

SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA HUTAN PINUS PENGGER DI PADUKUHAN SENDANG SARI KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

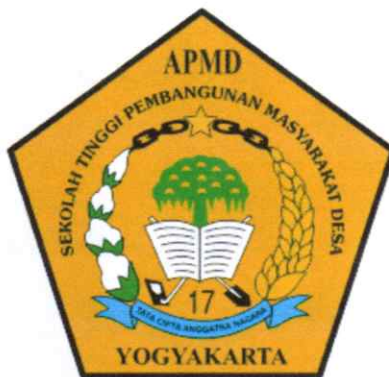
**VERONIKA MELANI MONE
NIM 18510025**

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025

SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA HUTAN PINUS PENGGER DI PADUKUHAN SENDANG SARI KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

**VERONIKA MELANI MONE
NIM 18510025**

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”YOGYAKARTA**

2025



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari, tanggal :

Jam :

Tempat :

NAMA

TANDA TANGAN

Dr. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si

Ketua Penguji/Pembimbing

Ratna Sesotya Wedadjati, S.Psi., M.Si, Psikolog.


Penguji Samping I

Hery Purnomo, S.Sos., M.P.A.

Penguji Samping II

Mengetahui

An
Ketua Program Studi Pembangunan Sosial



Hery Purnomo, S.Sos., M.P.A.

NIY 170 230 258

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Veronika Melani Mone
NIM : 18510025
Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA HUTAN PINUS PENGGER DI KALURAHAN TERONG PADUKUHAN SENDANG SARI KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 3 juni 2025

Yang menyatakan



Veronika melani mone

MOTTO

Tetaplah berpegang teguh pada prinsipmu agar tidak seorangpun dapat mengendalikanmu dalam segala hal. Teruslah percaya pada dirimu sendiri dan jangan mudah percaya pada omongan manusia karena hanya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji

(Penulis)

Orang yang sabar besar pengertiannya,tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan

(Amsal 15:18)

Jangan pernah susah hati terhadap orang-orang yang memperlakukanmu dengan buruk tetapi teruslah menjadi orang baik agar kelak engkau di kenang sebagai orang baik dan bukan menjadi orang jahat

(Tarsisius Gh.Kabole)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas berkat dan Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tentu dalam mengerjakan skripsi ini, banyak sekali pihak yang memberikan dukungan, mendoakan, serta memberikan semangat kepada saya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah menyemangati dalam menyelesaikan pendidikan saya.

1. Untuk kedua orang tua saya Bapak Tarsisius Gheda Kabole dan Mama Lusua Leko Dewa atas cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya untuk saya serta dukungan Doa dan motivasi dalam mewujudkan cita-cita saya, serta mendidik saya dan mengajarkan untuk hidup dengan sabar dan jujur
2. Kepada kakak saya Ablasisus Bali Mema, Tobias W. Moto, Aleksius W. Hepa, Mateus Y. Bani, Alfonsus R. kaka, Apliana Ambu Kaka, Katrina Jaha Walu, kembaranku Stevanus T. Bokol, adik Bungsu Selviana K. Ghoba, Antonius Mone Kaka, Kakak Ruben Dara tanggu, Yohanis Konda, Hendrika Melita Panggar yang selalu menyemangati dan mendorong saya untuk selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Serta seluruh keluarga besar Manokoho yang juga menyemangati dalam menyelesaikan pendidikan saya.
3. Dosen Pembimbing Akademik Dra. Widati, Lic.rer.reg terimakasih untuk bimbingan selama ini.
4. Dosen Pembimbing Ibu Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si yang selalu sabar membimbing saya dari awal hingga akhir dan juga menjadi motivator bagi saya untuk terus berjuang dan berusaha, semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria Penolong sejati selalu menopang dan memberkati Ibu dalam Segala Hal.
5. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta. (Ayung Wildan Pratiwi, Yunita Ekaliska Ayu)
6. Teman-teman seperjuangan sekaligus Keluarga di Yogyakarta yang tidak pernah jenuh dalam memberikan Doa dan Motivasi kepada saya. kakak Agustinus Pangga, Nona Vero, Meri, Iren, Novita Maghu, Frans Kanda, Inda Kondo, Adik Agmon, Adik Vian Mbali, Nelis, Ronal, Lorens, Selo, Maksu,

Rejhon, Tinus Momo, serta Semua Adik-adik di Timoho yang Penulis Tidak dapat sebut satu-satu.

7. Terimakasih untuk Kakak Rofinus Bata yang selalu menjadi pendengar setia dan selalu mensupport saya
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Pembangunan Sosial yang selalu berbagi cerita, pengalaman serta kesan selama kuliah.
9. Untuk Almamater tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
10. Terima kasih untuk diri sendiri yang terus kuat dalam menghadapi badai hidup yang datang silih berganti yang tiada henti-hentinya, semoga terus kuat dan semangat

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger Di Kalurahan Terong Padukuhan Sendang Sari Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi syarat menjadi Sarjana Strata I Program Studi pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Selain itu, penulis berharap agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau referensi untuk menambah ilmu pengetahuan terutama di Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharap Kritik, dan saran pembaca sehingga dapat menjadi bahan pelajaran bagi penulis untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agar dapat menjadi lebih baik di kemudian hari.

Penulis sangat Menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini merupakan buah bantuan dari pihak lain berupa bimbingan, saran, nasehat serta dukungan moril maupun material sangat membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Bapak Tarsisius Gheda Kabole dan mama Lusia Leko Dewa.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si. selaku Dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi.
4. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan materi kuliah khusus Dosen Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

5. Seluruh staf dan karyawan/karyawati Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
6. Pemerintah Kalurahan Terong, Padukuhan Sendang Sari, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pokdarwis Objek Wisata Hutan Pinus Pengger dan segenap masyarakat Kalurahan Terong yang sudah meluangkan waktunya Untuk melakukan wawancara.

Dengan Hati yang tulus Ikhlas, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua amal dan kebaikan yang telah di berikan Kepada penulis Skripsi ini. Akhir kata, besar harapan penulis agar karya kecil ini.

Yogyakarta, 27 Mei 2025

Penulis

Veronika Melani Mone

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori.....	10
1. Partisipasi Masyarakat	10
2. Pengelolaan Objek Wisata	17
3. Konsep Objek Wisata	20
4. Pengelolaan dan Manfaat Objek Wisata.....	20
E. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Lokasi Penelitian	26
3. Fokus Penelitian.....	26
4. Objek.....	27
5. Subjek/Informan	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
1. Metode Observasi	28
2. Metode Dokumentasi.....	28
3. Metode Wawancara	29
4. Jenis dan Sumber Data.....	30
G. Teknik Analisis Data	30
BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....	32
A. Sejarah Desa Terong.....	32

B. Keadaan Geografis Desa Terong	34
C. Keadaan Demografis	36
D. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	41
E. Profil Kelompok Sadar Wisata Pinus Pengger (POKDARWIS).....	45
F. Profil Wisata Pinus Pengger	47
BAB III MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA HUTAN PINUS PENGGER	50
A. Deskriptif Informan	50
B. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger melalui Partisipasi Pikiran, Tenaga, Harta Benda, Keterampilan, dan Sosial. 51	
C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengorganisasian Pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger.	66
D. Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger	73
E. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger	81
F. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat.....	85
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	98
PANDUAN WAWANCARA.....	102
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Batas Wilayah Desa Terong.....	36
Tabel II. 2 Pembagian Luas Wilayah Menurut Penggunaannya.....	36
Tabel II. 3 Data Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia.....	38
Tabel II. 4 Data Kependudukan berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	40
Tabel II. 5 Data Penduduk berdasarkan Mata Pencarian.....	41
Tabel II. 6 Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Terong.....	43
Tabel II. 7 Data Tingkat Kemiskinan KK Desa Terong.....	45
Tabel II. 8 Data Pengunjung dan Pendapatan.....	50
Tabel III. 1 Daftar Informan Penelitian.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, banyak dikenal sebagai Negara kepulauan terbesar di Samudra Pasifik, dengan memiliki wilayah yang membentang luas dari barat ke timur, mencakup daratan dan lautan. Secara geografis Indonesia kaya akan objek wisata alam dan budaya. Kekayaan alam dan keragaman budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara dan sehingga menjadi modal strategis dalam pengembangan sektor pariwisata, yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Pariwisata terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peluang usaha, dan investasi. Dengan potensi ini, Indonesia memiliki peluang besar dalam menarik minat wisatawan serta mengembangkan pengelolaan wisata berbasis lokal yang berkelanjutan. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dikelola secara optimal yang daerah wisata saat ini masih menghadapi tantangan seperti kurangnya infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, serta minimnya promosi yang berkelanjutan. Sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal dalam memperkuat fondasi pariwisata nasional dalam konsep berkelanjutan, dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta inovasi layanan berbasis teknologi digital untuk menjangkau pasar global secara lebih efektif.

Dengan kekayaan alam dan budaya merupakan suatu komponen yang penting dalam sektor pariwisata di Indonesia. Pariwisata telah terbukti mampu

mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga Indonesia memiliki peluang untuk menarik konsumen pengelolaan wisata lokal.

Partisipasi masyarakat dalam objek wisata merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan destinasi wisata. Partisipasi ini sangat penting untuk keberlanjutan industri pariwisata dan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Berikut beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam objek wisata.

Menurut Keith Davis dan Newstrom (1989) partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Ide utamanya adalah keterlibatan, kontribusi dan tanggung jawab. Selanjutnya menurut Isbandi (2007) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, potensi, dan kebutuhan masyarakat, pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses evaluasi terhadap perubahan yang terjadi. Pendapat Isbandi diperkuat dengan konsep partisipasi Cohen dan Uphoff (1980) yang menjelaskan partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya.

Sektor pariwisata kini berkembang pesat dan menjadi salah satu andalan untuk dalam perekonomian nasional. Daerah yang mampu mengelola potensi wisatanya dengan baik tentu akan mendapatkan banyak manfaat, yang mana akan memberikan dampak yang positif secara ekonomi utamanya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sering dijumpai praktik pengelolaan yang keliru, yang justru merugikan warga lokal dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, tentu diperlukan strategi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kelestarian budaya, lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat setempat. Pendekatan inklusif dan berbasis masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sektor pariwisata yang adil dan berkelanjutan.

Pengelolaan sektor pariwisata menjadikan salah satu sektor yang unggul dalam peningkatan perekonomian nasional, dengan memberikan banyak pemasukan bagi daerah, sehingga sektor pariwisata mampu memberikan manfaat baik terhadap kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat sebagai bentuk upaya kesejahteraan masyarakat, meskipun terkadang sering terjadi pengelolaan pariwisata yang salah dan tidak memberikan dampak baik untuk warga masyarakatnya. Diketahui bahwa pengelolaan wisata lokal, dimana pengelola dapat memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat namun di satu sisi dapat menimbulkan kerugian jika pengelolaan yang dilakukan tidak efektif, (Hary Hermawan, 2016). Pariwisata menjadi salah satu sumber devisa bagi

pemerintah Indonesia untuk menambah devisa negara melalui kegiatan pariwisata, dengan cara meningkatkan pariwisata lokal.

Setiap daerah memiliki potensi berupa sumber daya manusia dan alam yang menjadi faktor penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Pariwisata juga merupakan sektor strategis nasional yang berkembang pesat dalam menghadapi tantangan global, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan pariwisata yang terarah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), program pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut Purwanti dan Dewi dalam Sulastri (2020), jumlah kunjungan wisatawan sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri pariwisata, PAD, dan pendapatan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diketahui bahwa setiap daerah masing-masing memiliki kekayaan yang potensial untuk dikembangkan yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tidak dipisahkan sebagai penentu kemajuan dalam sektor pariwisata. Di sisi lain, pariwisata juga menjadi sektor pembangunan yang strategis nasional yang secara cepat berkembang untuk menghadapi tantangan globalisasi Nasional maupun Internasional. Sehingga Indonesia diperlukan pembangunan perencanaan dalam sektor pariwisata yang potensial untuk dikembangkan sebagai pendapatan daerah. Adapun usaha dalam memperbesar pendapatan asli

daerah, maka program pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Menurut Purwanti dan Dewi dalam (Sulastri, 2020) menjelaskan bahwa pengaruh jumlah kunjungan wisatawan akan sangat berarti untuk pengelolaan industri pariwisata dan pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat lokal, sehingga wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara tertarik untuk berkunjung. Kemudian menurut Rhamdyani dan Suharno (2021), peran serta masyarakat adalah kunci keberhasilan yang harus diwujudkan dan menjadi dasar pijakan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pokok program pembangunan ekowisata, khususnya menjawab isu strategis yaitu pemberdayaan perekonomian rakyat, yang menekankan perlunya keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk pemberdayaan kapasitas dan peran masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan (Dinas Pariwisata Jawa Tengah, 2002). Oleh karena itu pengelolaan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya dan pendapatan ekonomi masyarakat, sehingga perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini sedemikian pesat.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata menyebutkan bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan individu atau kelompok ke suatu tempat dalam jangka waktu tertentu untuk berekreasi, pengembangan diri, menikmati masa tua, atau mempelajari keunikan destinasi. Hal ini menegaskan bahwa pariwisata menjadi salah satu pondasi ekonomi

daerah serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Scace (1993) dan Tuwo (2011) menyatakan bahwa perkembangan ekosistem adalah salah satu alternatif pembangunan yang dapat membantu mengatasi masalah pemanfaatan yang sifatnya merusak dan mengancam kelestarian sumber daya. Pengembangan ekowisata dapat didasarkan pada kondisi ekologi dan juga daya dukung kawasan tersebut menurut (Rajab et al., 2021).

Sedangkan menurut Suswantoro dalam Ismail (2020), pengembangan pariwisata perlu memperhatikan tiga hal utama: (1) promosi terpadu di dalam dan luar wilayah, (2) aksesibilitas sebagai pendukung lintas sektor, dan (3) pengelolaan kawasan pariwisata. Ketiga aspek ini menjadi faktor penunjang utama dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Sehingga objek wisata harus dikelola dengan konsep yang kuat dan perencanaan yang matang. Selain itu, pengukuran kualitas dan keunggulan destinasi penting dilakukan untuk menilai daya saing serta menyusun strategi pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan dengan dukungan berupa ide, gagasan, dan tenaga sangat dibutuhkan dalam pembangunan pariwisata.

Berdasarkan pendapat memperlihatkan bahwa konsep yang kuat perencanaan matang menjadi penunjang di dalam pengembangan sektor wisata. Hal ini juga berlaku di objek wisata Hutan Pinus Pengger, Sendang Sari, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan salah satu wisata yang dapat dijadikan pilihan dalam menikmati keindahan alam dengan keunikan seperti pendakian,

perkemahan, dan penelitian ilmiah kemudian memiliki fasilitas yang mendukung dalam memberikan kesan yang unik seperti jelajah alam, panjat tebing, sepeda hutan dan spot foto, jembatan kayu, rumah pohon, dan beragam instalasi seni yang dibuat untuk mempercantik kawasan. Demikian juga fasilitas pendukung seperti jalan setapak, tempat parkir, dan area foto yang menarik.

Pengelolaan Hutan Pinus Pengger dikembangkan sebagai destinasi wisata oleh masyarakat setempat dan pemerintah Kabupaten Bantul bekerja sama dalam memelihara dan mengelola hutan ini dengan baik dengan tujuan pelestarian alam dengan program konservasi sebagai upaya melindungi ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. Mereka terlibat dalam berbagai aspek, mulai dari penjualan tiket, penyediaan fasilitas, hingga pemandu wisata. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi pengelola, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat secara ekonomi. Sebagai destinasi wisata yang menarik banyak pengunjung, pengelola Hutan Pinus Pengger juga berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah. Tempat-tempat sampah disediakan di berbagai titik untuk menjaga kebersihan hutan dan memastikan kenyamanan pengunjung.

Meskipun sebagian warga yang mendapatkan pekerjaan, baik sebagai pengelola, pemandu wisata, atau pedagang yang menjual oleh-oleh khas daerah. Hutan Pinus Pengger ini dahulunya merupakan sebuah hutan produksi getah yang berasal dari pohon pinus yang kemudian terbengkalai karena tidak digunakan lagi sehingga mengakibatkan hutan ini tidak terawat dengan baik, kemudian lama kelamaan beralih fungsi menjadi tempat wisata yang menarik

untuk dikunjungi oleh wisatawan. Bukan hanya karena kondisi alamnya yang indah akan tetapi juga karena berbagai fasilitas dan wahana yang disediakan oleh Hutan Pinus Pengger itu sendiri. Hutan Pinus Pengger ini merupakan salah satu wisata baru karena baru diresmikan tahun pada pertengahan tahun 2016 lalu. Setelah pembukaannya, Hutan Pinus Pengger ini terus mengalami peningkatan pengunjung karena daya tarik yang dimilikinya. Pada pengembangannya, masyarakat sekitar ikut serta terlibat mengelola Hutan Pinus Pengger menjadi tempat wisata baru.

Namun wisata pinus pengger masih mengalami berbagai kendala utamanya yang mana masyarakat tersebut belum semua ikut andil dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini juga akan mengganggu pengembangan dan faktor terhadap rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata bisa menjadi kendala dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Demikian juga yang menjadi faktor yang mungkin mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat ekonomi yang dapat diperoleh, kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan, atau mungkin adanya ketergantungan pada pihak luar dalam pengelolaan yang lebih profesional.

Dengan demikian, untuk mewujudkan ekowisata tentu sangat diharapkan adanya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan budaya serta mendukung dan menciptakan suasana kondusif bagi pengunjung wisatawan. Dengan terwujudnya ekowisata diharapkan masyarakat memperoleh manfaat secara ekonomi sehingga dapat tumbuh motivasi untuk melakukan kegiatan kepariwisataan secara swadaya, berpijak pada hal tersebut

maka perlu informasi secara jelas bagaimana sebenarnya peran serta masyarakat sekitar terhadap keberadaan Pinus Pengger.

Berdasarkan uraian diatas yang mana dalam mewujudkan pengelolaan sektor wisata sekaligus mendukung kondusifitas dan pemberian kesempatan masyarakat untuk terlibat didalam pengelolaan sektor wisata sebagai upaya dalam meningkat kesejahteraan masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam membangun sektor wisata. Oleh karena itu, dalam uraian tersebut tentu menjadi tujuan utama peneliti dalam mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul **Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger di Sendang Sari, Kelurahan Terong, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan dalam penelitian “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger di Sendang Sari, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Hutan Pinus Pengger Kapanewon Dlingo
- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Hutan Pinus Pengger. Kalurahan Terong, Kapanewon. Dlingo, Kab. Bantul, DIY.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara Akademis

Penelitian menjadikan sebagai rujukan secara akademis dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai tingkat partisipasi masyarakat Desa Terong dalam membangun pariwisata Hutan Pinus Pengger.

b. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini dijadikan acuan dan motivasi sekaligus dapat menambah wawasan secara nyata mengenai tingkat partisipasi masyarakat Sendang Sari, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Kerangka Teori

1. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi Masyarakat adalah proses di mana individu atau kelompok dalam masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan atau program yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi ini sangat penting dalam membangun sebuah sistem yang demokratis, di mana suara dan aspirasi masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembangunan dan perubahan sosial.

Menurut Sastroeputro (dalam Kusmanto, 2014), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan spontan yang disertai tanggung jawab dan kesadaran terhadap kepentingan bersama. Theodorson (dalam

Marjidani, 2010) menyatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan individu atau masyarakat dalam suatu kegiatan.

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan dengan kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama.

b. Pengertian Masyarakat

Secara umum, masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dan memiliki interaksi sosial, perubahan sosial, serta rasa kebersamaan. Menurut Ralph Linton (dalam Prasetyo, 2020), masyarakat adalah kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama hingga membentuk satu kesatuan sosial dengan batas yang jelas. Menurut Selo Soemardjan (dalam Prasetyo, 2020) menyebut masyarakat sebagai sekelompok orang yang hidup bersama, memiliki kebudayaan, wilayah, identitas, tradisi, serta rasa persatuan.

Demikian juga Soerjono Soekanto (dalam Julia, 2012) menyebutkan ciri pokok masyarakat, yaitu: 1) Manusia yang hidup bersama, 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama, 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan, 4) Mereka merupakan suatu sistem yang hidup bersama. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (dalam Mustanir, 2017) menambahkan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi melalui adat istiadat yang terus berlangsung dan terikat oleh identitas bersama.

Berdasarkan pendapat diatas yang kemukakan dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kesatuan kehidupan yang menetap dalam suatu wilayah dalam waktu lama, memiliki identitas, interaksi sosial, kebiasaan, serta aturan hidup bersama yang mengikat.

c. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara umum, partisipasi merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelestarian (Dewi, 2013). Menurut Adiyoso, partisipasi masyarakat menjadi komponen penting dalam mendorong kemandirian dan pemberdayaan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata sangat diperlukan, karena pengabaian partisipasi lokal dapat menyebabkan kegagalan dalam pengembangan desa wisata (Nasikun dalam Dewi, 2013). Meski demikian, terdapat dua perspektif dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pariwisata: 1).Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. 2).Manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembangunan pariwisata.

Sedangkan menurut Timothy (dalam Dewi, 2013) menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mengakomodasi keinginan dan tujuan mereka dalam pembangunan dan pengelolaan pariwisata agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, sehingga dapat disimpulkan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dalam setiap tahap pengembangan desa wisata, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, agar mereka dapat merasakan manfaat ekonomi dan kesejahteraan dari pengelolaan pariwisata.

d. Tahapan Partisipasi Masyarakat

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi ini penting karena masyarakat ingin terlibat dalam menentukan arah pembangunan. Bentuknya antara lain menghadiri rapat, diskusi, memberi masukan, serta menyampaikan tanggapan atau penolakan terhadap program. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud nyata dari partisipasi dalam mengambil keputusan bermacam-macam, seperti menghadiri rapat, diskusi, sumbangan pikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan

Merupakan tindak lanjut dari rencana yang telah disepakati. Pelaksanaan program memerlukan keterlibatan berbagai pihak, terutama pemerintah sebagai sumber utama pembangunan.

3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Terkait hasil program, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kualitas terlihat dari peningkatan output, sedangkan kuantitas diukur dari persentase keberhasilan program sesuai target.

4) Partisipasi dalam evaluasi

Bertujuan menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana awal serta mengidentifikasi adanya penyimpangan.

Menurut Mardikanto (dalam Mustanir, 2017), partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan mencakup empat tahapan utama, yaitu:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan masyarakat sejak awal dalam menentukan arah dan tujuan kegiatan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan program yang telah direncanakan.
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan masyarakat turut merasakan dan mengambil manfaat dari hasil kegiatan.
- d. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi – keterlibatan masyarakat dalam menilai keberhasilan dan mengawasi jalannya program.

Berdasarkan keempat tahapan ini, partisipasi masyarakat menjadi lebih utuh dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar

sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat itu sendiri, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan kegiatan.

Menurut Hamijo dan Iskandar (dalam Bobsuni, 2021), bentuk-bentuk partisipasi masyarakat meliputi:

- 1). Partisipasi pikiran; Keterlibatan dalam bentuk ide, saran, atau pendapat melalui forum seperti rapat atau diskusi.
- 2). Partisipasi tenaga; Kontribusi fisik dalam kegiatan pembangunan, kerja bakti, atau bantuan sosial di lingkungan desa.
- 3). Partisipasi harta benda; Sumbangan materi seperti uang, makanan, atau barang lain untuk mendukung kegiatan sosial atau pembangunan.
- 4). Partisipasi keterampilan dan kemahiran; Pemberian bantuan melalui keahlian tertentu, seperti pelatihan, produksi kerajinan, atau dukungan teknis untuk mendukung ekonomi desa.
- 5). Partisipasi sosial; Keterlibatan dalam kegiatan sosial sebagai wujud solidaritas dan kebersamaan antarwarga (keguyuban).

Berdasarkan kelima bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada fisik dan materi, tetapi juga mencakup aspek intelektual, keahlian, dan sosial. Partisipasi yang menyeluruh akan memperkuat proses pembangunan

berbasis masyarakat. Sehingga dalam bentuk apapun masyarakat dapat berpartisipasi sesuai dengan porsinya masing-masing agar terwujudnya kepentingan bersama. Sebagai sebuah proses, maka penerapannya membutuhkan pemahaman langkah/tahap penerapannya.

5) Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

Menurut Aprelia Theresia (2014), partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Kemauan; Partisipasi tumbuh dari kemauan masyarakat, yang didorong oleh sikap mental untuk memperbaiki dan membangun kehidupan mereka.
- b) Kemampuan; Kemampuan masyarakat menjadi kunci agar kesempatan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
- c) Kesempatan; Dukungan berupa kesempatan untuk terlibat dapat mendorong tumbuhnya kemauan dan keikutsertaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas bahwa partisipasi masyarakat sangat bergantung pada tiga faktor utama: kemauan, kemampuan, dan kesempatan untuk terlibat. Selain itu, tolak ukur partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kontribusi mereka di setiap tahap. Pada tahap pengambilan keputusan, indikatornya meliputi kehadiran dalam rapat, sumbangan pemikiran, serta tanggapan atau penolakan terhadap program.

Pada tahap pengambilan manfaat, tolok ukurnya adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi, yang tercermin dari keberhasilan program.

2. Pengelolaan Objek Wisata

a. Pengertian Pengelolaan Objek Wisata

Pengelolaan objek wisata adalah proses sistematis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sumber daya alam serta fasilitas di suatu Destinasi. Tujuannya adalah meningkatkan pengalaman wisata, menjaga kelestarian lingkungan, dan budaya serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat (Terry, 2009).

Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah. Daya tarik ini bisa berupa keindahan alam, budaya, kegiatan wisata, atau hal lainnya. Karena peranannya yang penting, objek wisata perlu dirancang, dibangun, dan dikelola secara profesional agar mampu menarik minat wisatawan. Contoh objek wisata alam meliputi pantai, gunung, sungai, danau, serta laut. Sementara itu, objek wisata berupa bangunan dapat berupa peninggalan sejarah seperti museum, benteng, dan bangunan bersejarah lainnya.

Suatu tempat dikatakan sebagai objek wisata harus memenuhi hal berikut:

- 1) Adanya objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan Daerah lainnya
- 2) Adanya fasilitas rekreasi atau *amusements* yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama di tempat tersebut.

- 3) Adanya fasilitas untuk berbelanja (*shopping*) terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke daerah masing-masing

Pengelolaan pariwisata didefinisikan sebagai *strategic and action programs using and coordinating available techniques to control and influence to tourism supply and visitor demand in to achieved defined policy goals* strategi yang digunakan dan mengkoordinasi teknik yang tersedia untuk mengontrol dan mempengaruhi penawaran serta permintaan pengunjung untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan Bucheri Alma dan Donni Juni Prians (2014).

Menurut Nugroho (2003), pengelolaan adalah istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Secara etimologis, kata pengelolaan berasal dari kata "kelola" yang berarti mengatur atau mengurus. Pengelolaan merujuk pada proses mengatur, mengurus, dan menangani sesuatu dengan tujuan mencapai hasil atau sasaran tertentu. Dengan demikian, pengelolaan merupakan cabang ilmu manajemen yang fokus pada bagaimana mengelola sumber daya dan proses untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Terry (2009), pengelolaan sama dengan manajemen, yang dipahami sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Proses ini memanfaatkan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keberhasilan pengelolaan sangat bergantung pada ketepatan langkah-langkah pelaksanaan manajemen. Afifuddin (2010) menjelaskan bahwa

langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut: 1).Menentukan strategi 2).Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab, 3).Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu, 4).Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana, 5).Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi, 6).Menentukan ukuran untuk menilai, 7).Mengadakan pertemuan, 8).Pelaksanaan, 9).Mengadakan penilaian, 10).Mengadakan review secara berkala, 11).Pelaksanaan tahap berikutnya, 12). Berlangsung secara berulang-ulang.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai, baik berupa kekayaan alam, budaya, maupun hasil karya manusia, yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Muljadi (2010) menambahkan bahwa sektor pariwisata berperan penting dalam membangun berbagai aspek kehidupan bangsa. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata juga turut memperkuat ketahanan ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Disimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang alam yang ada sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.

3. Konsep Objek Wisata

Objek wisata adalah segala sesuatu yang unik, indah, dan bernilai, meliputi kekayaan alam, budaya, dan hasil karya manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan (Ritwan dalam Irfan, 2021). Suwanto (dalam Irfan, 2021) menambahkan bahwa objek wisata merupakan potensi yang mendorong kedatangan wisatawan ke suatu daerah. Potensi wisata dibagi menjadi tiga kategori utama:

- a. Potensi Alam; meliputi flora, fauna, dan bentang alam seperti pantai dan hutan, yang jika dikembangkan dengan menjaga lingkungan akan menarik wisatawan
- b. Potensi Kebudayaan; mencakup adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, dan peninggalan sejarah seperti bangunan atau monumen.
- c. Potensi Manusia; berupa pertunjukan seni budaya, seperti tarian dan pementasan khas daerah.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek wisata adalah segala aset alam, budaya, dan hasil cipta manusia yang berpotensi menarik wisatawan ke suatu daerah.

4. Pengelolaan dan Manfaat Objek Wisata

- a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan, yang berasal dari kata manajemen (to manage), berarti mengatur, mengelola, dan mengendalikan kegiatan agar berjalan efektif dan efisien. Menurut Melayu S. (2007), pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, pengelolaan

adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengarahan, dan pengaturan sumber daya, baik personal maupun material, agar usaha berjalan dengan baik secara efektif dan efisien.

Fattah (2001) menambahkan bahwa manajemen mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Merupakan terjemahan dari kata *management* berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengelola dan mengendalikan. Namun kata *management* sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan” yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara “efektif dan “efisien”.

Menurut (Melayu S, 2007) pengelolaan adalah suatu ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, yang didukung oleh sumber-sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas pengelolaan adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik dan memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan dalam menggunakan semua potensi yang ada baik personal maupun material secara efektif dan efisien. Menurut (Fattah, 2001) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan seorang manajemen atau pemimpin, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan

pengawasan. Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen melibatkan proses dasar seperti pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan, yang merupakan syarat penting dalam pengelolaan. Penelitian ini berpedoman pada Fattah (2004) yang menyatakan bahwa fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

1. Perencanaan

Menurut Susanto (2014), perencanaan adalah penentuan apa yang akan dilakukan, oleh siapa, di mana, dan bagaimana cara mencapainya untuk mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian

Manullang (2002) menjelaskan pengorganisasian sebagai penetapan struktur organisasi, tugas, fungsi, serta hubungan antar unit dalam organisasi.

3. Pengendalian

Menurut G.R. Terry dan Henri Fayol, pengendalian adalah proses memastikan aktivitas sesuai rencana, dan jika tidak, dilakukan

perbaikan agar tidak menyimpang dari tujuan. Tujuannya adalah agar kegiatan dan penggunaan sumber daya berjalan sesuai rencana.

4. Pengawasan

Pengawasan, menurut Manullang (2002), adalah pemantauan pimpinan terhadap bawahan agar tugas berjalan lancar dan mencegah penyimpangan yang merugikan organisasi.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses manajemen yang terencana dan terorganisir melalui perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan bersama.

b. Manfaat Pariwisata

Forsyth dan Dwyer (2010) menjelaskan bahwa manfaat ekonomi pariwisata berbeda dengan dampak atau kontribusi ekonominya. Manfaat ekonomi berarti warga lebih diuntungkan dengan adanya pariwisata, sehingga perlu dianalisis keuntungan bersih yang mencakup biaya pengembangan dan biaya peluang pariwisata. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhatikan dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan saat ini dan masa depan, serta memenuhi kebutuhan wisatawan, industri, lingkungan, dan masyarakat di semua jenis destinasi, (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2016).

Pariwisata adalah sumber pendapatan desa yang dapat meningkatkan ekonomi jika dikelola dengan baik. Sedarmayanti (2018) menyatakan

bahwa pembangunan dan pengembangan pariwisata yang terencana akan memberikan banyak manfaat dan dampak positif.

1) Manfaat Ekonomi

Meningkatnya arus wisatawan lokal maupun mancanegara ke suatu daerah menuntut aneka ragam pelayanan dan fasilitas yang semakin meningkat jumlah dan ragamnya. Hal ini memberi manfaat ekonomi bagi penduduk, pengusaha maupun pemerintah setempat diantaranya: a) Peningkatan penerimaan devisa. b) Bertambahnya peluang usaha, c) Terbukanya lapangan kerja baru, d) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, e) Mendorong pembangunan wilayah, f) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2) Manfaat sosial budaya meliputi: a) Pelestarian budaya dan adat istiadat, b) Peningkatan kecerdasan masyarakat, c) Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, d) Pengurangan konflik sosial

3) Manfaat pariwisata dalam konteks berbangsa dan bernegara antara lain: a) Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, b) Meningkatkan rasa memiliki dan keinginan menjaga serta mempertahankan negara, yang berujung pada tumbuhnya cinta

tanah air, c) Memelihara hubungan internasional yang baik dalam pembangunan pariwisata

- 4) Manfaat pariwisata bagi berbangsa dan bernegara meliputi: a) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, b) Menumbuhkan rasa memiliki serta keinginan untuk menjaga dan mempertahankan negara, yang berujung pada cinta tanah air, c) Menjalin dan memelihara hubungan internasional yang baik dalam pengembangan pariwisata
- 5) Manfaat bagi lingkungan dalam pengembangan pariwisata adalah memenuhi kebutuhan wisatawan akan suasana yang tenang, bersih, dan bebas polusi, yang dapat memulihkan kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata juga berperan penting dalam pelestarian lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pariwisata meliputi segala kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menikmati keindahan objek wisata sebagai tempat rekreasi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, pariwisata juga memberi manfaat bagi masyarakat setempat dengan meningkatkan perekonomian melalui usaha kreatif dan membuka lapangan kerja baru.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pengelola. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan nilai-nilai secara menyeluruh, dengan menggambarkan secara deskriptif menggunakan kata-kata dalam konteks alami. Metode ini cocok untuk menggali secara mendalam dinamika partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata yang kompleks dan kontekstual.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti turun ke lapangan guna melakukan penelitian dan pengumpulan data, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kalurahan Sendang Sari Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Fokus Penelitian

Partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam keberlanjutan pengelolaan wisata Hutan Pinus Pengger. Keterlibatan ini tercermin dalam beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger melalui partisipasi pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, dan sosial.

- b. Partisipasi masyarakat dalam pengorganisasian pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger.
- c. Partisipasi masyarakat dalam Pengendalian pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger.
- d. Partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger.
- e. Faktor pendorong dan penghambat bagi masyarakat dalam berpartisipasi membangun Pariwisata Hutan Pinus Pengger.

4. Objek

Objek penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger, yang mencakup keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran serta masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan potensi wisata tersebut.

5. Subjek/Informan

Dalam penelitian ini, sumber data dipilih secara *purposive* yaitu teknik pengambilan sumber data, kedudukan dan fungsi kedalaman informasi yang dibutuhkan dalam analisis penelitian.

- a. Lurah terong (1)
- b. Kelompok sadar wisata (POKDARWIS).(1)
- c. Masyarakat sekitar objek wisata Hutan Pinus Pengger (5)
- d. Dukuh.(1)
- e. Pedagang (3)

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama. Teknik-teknik ini dipilih agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi sebenarnya terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger secara menyeluruh dan akurat.

1. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan sistematis terhadap gejala yang muncul di lapangan (Widoyo dalam Dimu, 2021). Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh data empiris mengenai partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengawasi pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger.

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, mencakup pengamatan terhadap fasilitas umum seperti tempat sampah, papan informasi, pos jaga, serta kondisi lingkungan dan keterlibatan warga, misalnya melalui spanduk kegiatan atau jadwal ronda. Hasil observasi menunjukkan adanya partisipasi masyarakat yang bervariasi, mulai dari yang aktif dan terstruktur hingga yang masih bersifat pasif.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis. Menurut Riyanto (2022), metode ini bertujuan mencatat dan mengumpulkan data yang sudah ada, termasuk gambar atau arsip yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi dokumen seperti Perdes, AD/ART, dan Rencana

Kerja Objek Wisata Hutan Pinus Pengger. Selama di lapangan, peneliti tidak hanya melakukan observasi dan wawancara, tetapi juga mendokumentasikan kondisi dan aktivitas masyarakat secara langsung. Dokumentasi ini penting sebagai bukti visual yang memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Pengawasan lapangan umumnya dilakukan oleh anggota Pokdarwis dan beberapa warga yang terorganisir. Fasilitas umum seperti papan larangan merokok dan tempat sampah tersedia, meski belum sepenuhnya dipenuhi pengunjung. Beberapa warga yang tidak tergabung secara resmi tetap menunjukkan kepedulian, seperti menegur anak-anak atau membantu pengunjung. Dokumentasi visual ini memberikan gambaran konkret tentang partisipasi masyarakat, yang meski sudah berjalan, masih memerlukan peningkatan, khususnya dari warga di luar struktur organisasi.

3. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab antara peneliti dan informan guna memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Satori dan Komaria (dalam Adrika, 2020), teknik ini bertujuan menggali keterangan dari subjek yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat atau terdampak oleh pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger.

Tujuannya untuk memahami tingkat partisipasi, bentuk keterlibatan, kendala yang dihadapi, serta harapan masyarakat terhadap pengelolaan wisata berbasis komunitas. Narasumber dipilih dari berbagai latar belakang

untuk mendapatkan data yang beragam dan komprehensif. Peneliti memilih narasumber dari berbagai latar belakang agar memperoleh data yang beragam, antara lain:

- a. Lurah Kalurahan Terong
- b. Pengelola Objek Wisata Hutan Pinus Pengger
- c. Warga lokal biasa (baik yang aktif maupun yang tidak terlibat langsung)
- d. Tokoh masyarakat Dukuh Sendang sari
- e. Pelaku usaha lokal (pedagang makanan, penjaga parkir)

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala informasi yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak pertama melalui wawancara dan observasi.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data pendukung berupa dokumen, catatan, atau arsip yang relevan di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan proses pengelompokan dan pengolahan data sesuai jenisnya, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran rinci berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat naratif dan dikategorikan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta kesimpulan

yang akurat. Mengacu pada Miles dan Huberman (dalam Latifah, 2021), terdapat tiga tahapan analisis data:

1. Reduksi Data

Dilakukan dengan menyaring data yang relevan, bermakna, dan penting, sesuai fokus penelitian. Proses ini membantu peneliti menentukan informasi utama yang dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif atau teks deskriptif untuk memudahkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan diperoleh dari data yang telah disajikan, melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan kesimpulan tetap konsisten dengan permasalahan penelitian.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Terong

Pada masa geger Suroyudo di Kerajaan Mataram, seorang prajurit bernama Ki Potrojiwo mengungsi ke timur bersama istri, anak perempuannya Nyi Jopotro, dan cucunya Trononggo. Setelah Ki Potrojiwo wafat dan dimakamkan di Gunung Sentono, Piyungan, Nyi Jopotro bersama Trononggo melanjutkan perjalanan ke arah timur hingga tiba di sebuah wilayah hutan yang ditumbuhi banyak tanaman terong liar. Tempat itu kemudian mereka namai Alas Terong. Alas Terong yang terletak di perbukitan dan jauh dari pusat kekuasaan Mataram menjadi tempat tinggal mereka. Seiring waktu, beberapa orang datang dan menetap di sana, membentuk komunitas sosial yang semakin berkembang. Trononggo kemudian menikah dan dikaruniai dua anak: Trosentono dan Tromenggolo.

Saat Trononggo menua, ia menunjuk Trosentono sebagai pemimpin masyarakat Alas Terong dengan sebutan Bekel, menjabat sejak tahun 1912 hingga 1930. Kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya, Demang Harjoutomo, yang menjabat hingga tahun 1951. Setelah itu, jabatan dilanjutkan oleh Joyo Wiyarjo, dan sebutan pemimpin desa berubah dari Bekel menjadi Lurah. Joyo Wiyarjo menjabat hingga 1963, lalu digantikan oleh Harjosuwarno berdasarkan keputusan Penewu Kapanewon Kota Gede. Pada tahun 1974, setelah Kecamatan Dlingo resmi berdiri, Desa Terong yang semula berada di wilayah

Kotagede SK masuk ke wilayah Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Harjosuwarno tetap menjabat hingga purna tugas tahun 1992.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, sistem pemilihan kepala desa mulai menggunakan metode pemilihan langsung. Dalam pemilihan tahun 1994, Sudirman terpilih sebagai Kepala Desa Terong dan kembali terpilih pada 2002 melalui pemilihan melawan kotak kosong. Masa kepemimpinan Sudirman, S.E. berakhir pada Mei 2012. Sebelum masa jabatannya habis, BPD Desa Terong membentuk panitia pemilihan lurah. Namun, karena tidak ada calon hingga batas akhir penjaringan pada 25 April 2012, maka Poniran (Carik) ditunjuk sebagai Penjabat Lurah oleh Camat Dlingo. Penjaringan dibuka kembali pada 10 Oktober 2012, dan menghasilkan tiga bakal calon: Welasiman, Sukamda, dan Sugiyono, S.E.. Dalam pemungutan suara tanggal 4 November 2012, Welasiman terpilih sebagai Lurah Desa Terong.

Sejak bulan Mei 2012, jabatan Lurah Desa Terong diemban oleh Poniran sebagai penjabat sementara. Masa tugasnya berakhir pada 20 November 2012, ditandai dengan pelantikan Welasiman sebagai Lurah definitif hasil pemilihan, dengan masa bakti 2012–2018. Berikut daftar kepemimpinan Desa Terong sejak tahun 1912:

- a. Trosentono (Bekel) – 1912–1930
- b. Demang Harjoutomo – 1930–1950
- c. Joyo Wiyarjo – 1950–1966
- d. Harjosuwarno – 1966–1992
- e. Sudirman – 1994–2002

- f. Ngabehi Sudirman Wiro Mandoyo (Sudirman, S.E.) – 2002–2012
(mendapat gelar kekancingan dari Kadipaten Pakualaman)
- g. Welasiman – 2012–2018
- h. Sugiyono, S.E. – 2018–2024

B. Keadaan Geografis Desa Terong

Kalurahan Terong merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan resmi dibentuk pada tahun 1912. Secara administratif, Kalurahan Terong memiliki kode wilayah 340211205 dan kode pos 55783.

Terletak di kawasan perbukitan dengan ketinggian antara 325–350 meter di atas permukaan laut, Kalurahan Terong memiliki luas wilayah sekitar 775,86 hektar. Lokasinya berjarak sekitar 7 km dari pusat Kecamatan Dlingo, 23 km dari ibu kota Kabupaten Bantul, dan 25 km dari pusat Kota Yogyakarta.

Batas Wilayah Kalurahan Terong:

- Utara: Kalurahan Srimulyo (Kapanewon Piyungan)
- Timur: Kalurahan Jatimulyo (Kapanewon Dlingo)
- Selatan: Kalurahan Muntuk (Kapanewon Dlingo)
- Barat: Kalurahan Wonolelo (Kapanewon Pleret)

Tabel II. 1 Batas Wilayah Desa Terong

Batas wilayah	Nama Desa	Kecamatan
Utara	Desa Srimulyo	kecamatan Piyungan
Timur	Desa Jatimulyo	kecamatan Dlingo
Selatan	Desa Muntuk	kecamatan Dlingo
Barat	Desa Wonolelo	Kecamatan Pleret
Luas wilayah Desa Terong		775,8615 Ha

Sumber: Monografi Desa Terong Tahun 2024

Gambaran Wilayah Desa Terong:

Tabel II. 2 Pembagian Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

No	Keterangan	Luas (Ha)
1	Luas pemukiman	37.00
2	Luas persawahan	144.80
3	Luas perkebunan	86.40
4	Luas kuburan	0.40
5	Luas pekarangan	106,00
6	Luas perkantoran	0.79
7	Luas sarana prasarana	23.63
8	Tegalan	521.65
	TOTAL	775.8615

Sumber: <http://Terong-bantul.Desa.id/first> 2024

Penggunaan lahan di Kalurahan Terong didominasi oleh sektor pertanian, meliputi sawah, perkebunan, dan pekarangan produktif. Selain itu, sebagian lahan juga dimanfaatkan untuk pemukiman serta pembangunan sarana dan prasarana umum. Dominasi lahan pertanian ini sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, di mana mayoritas warga bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh harian lepas. Hal ini menunjukkan

bahwa Kalurahan Terong memiliki karakteristik sebagai desa agraris yang masih mengandalkan hasil bumi sebagai sumber utama penghidupan.

Dalam beberapa tahun terakhir, mulai terlihat upaya diversifikasi pemanfaatan lahan, seperti pengembangan kawasan wisata alam berbasis pertanian, kebun edukatif, dan pelatihan pertanian berkelanjutan. Potensi ini menjadi peluang besar bagi Kalurahan Terong untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif berbasis sumberdaya lokal. Luas penggunaan lahan di Kalurahan Terong dapat dilihat pada tabel di atas yang mana lahan persawahan, lahan pekarangan, dan perkebunan, serta penggunaan lahan pada pembangunan sarana-prasarana umum, pemukiman, dan pemukiman. Dari penggunaan tersebut, penggunaan lahan banyak digunakan pada bidang pertanian atau perkebunan. Hal tersebut, sejalan dengan data kependudukan Kalurahan Terong bahwa hampir sebagian masyarakat menggeluti bidang pertanian atau sebagai petani dan buruh harian.

C. Keadaan Demografis

1. Jumlah Penduduk

Data kependudukan merupakan informasi dasar mengenai warga negara yang berdomisili di suatu wilayah, khususnya mereka yang telah memasuki usia produktif dan memiliki identitas kependudukan. Data ini menjadi acuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penyaluran bantuan sosial, perencanaan program, serta pendataan kelompok masyarakat berdasarkan kategori tertentu. Di Kalurahan Terong, data kependudukan digunakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial

masyarakat, sehingga mempermudah pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Selanjutnya untuk mengetahui dan memahami terkait kependudukan di Kalurahan Terong maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel II. 3 Data Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		laki-laki	Perempuan	
1	>1	145	48	226
2	2-4	113	131	277
3	4-9	194	174	400
4	10-14	205	193	432
5	15-19	227	188	415
6	20-24	200	199	399
7	25-30	197	198	395
8	30-34	162	195	357
9	35-39	214	183	397
10	40-44	195	215	410
11	45-49	216	216	432
12	50-54	184	185	369
13	55-59	174	204	378
14	60-64	148	160	308
15	65-69	95	125	220
16	70-74	96	131	227
17	75+	117	147	264
Total		2.881	2.892	5.906

Sumber: Monografi Desa Terong Tahun 2024

Berdasarkan data jumlah penduduk, perbandingan antara laki-laki dan perempuan di Kalurahan Terong relatif seimbang, tanpa dominasi jenis kelamin tertentu secara kuantitatif. Hal ini menunjukkan bahwa pola kelahiran dalam beberapa dekade terakhir berjalan proporsional, sehingga isu ketimpangan gender secara struktural, seperti penindasan berbasis jenis kelamin, cenderung kecil kemungkinan terjadi di wilayah ini. Dilihat dari kelompok usia, penduduk didominasi oleh usia 45–49 tahun (432 orang), disusul usia 15–19 tahun (415 orang), 40–44 tahun (410 orang), 20–24 tahun (399 orang), dan 10–14 tahun (398 orang). Secara keseluruhan, tidak terdapat perbedaan signifikan antar generasi. Selisih antara kelompok usia 40–60 tahun dan 15–39 tahun hanya sekitar 2–3%, menunjukkan distribusi usia yang cukup merata.

2. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir, meningkatkan kualitas hidup, dan menentukan status sosial seseorang. Selain itu, pendidikan turut membentuk karakter, kreativitas, serta prospek kehidupan masyarakat. Di tingkat wilayah, pendidikan menjadi indikator kualitas sumber daya manusia dan acuan dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menjadi cara efektif untuk memahami kondisi sosial masyarakat. Jumlah penduduk Kalurahan Terong berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut, sebagai dasar analisis pembangunan dan potensi wilayah.

Tabel II. 4 Data Kependudukan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat SD/Sederajat	727	823	1550
2	SLTP/Sederajat	749	613	1362
3	SLTA/Sederajat	588	626	1214
4	Tidak/Belum Sekolah	568	581	1149
5	Belum Tamat SD/Sederajat	231	200	431
6	Diploma IV/Strata I	62	63	125
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	23	24	47
8	Diploma I/II	6	12	18
9	Strata II	5	4	9
10	Strata III	1	0	1
TOTAL				5906

Sumber: Monografi Desa Terong Tahun 2024

Data kependudukan Kalurahan Terong menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat hanya menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah menengah ke bawah. Hanya 1,4% atau 148 orang yang mencapai pendidikan tinggi, menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan yang cukup signifikan. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam merancang program pemberdayaan dan peningkatan akses pendidikan. Pendidikan yang merata akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan kunci dalam mendorong pembangunan daerah menuju kemajuan yang berkelanjutan. Bukan dilihat dari sejauh mana pembangunan infrastrukturnya, program

yang dijalankan, serta pendapatan ekonomi nya tetapi dilihat dari sumber daya Manusia (SDM)

3. Data Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

Data penduduk berdasarkan mata pencaharian mencerminkan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari masyarakat Kalurahan Terong, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Mata pencaharian warga cukup beragam, mencakup berbagai sektor ekonomi sesuai bidang yang mereka tekuni. Informasi lebih lanjut mengenai jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel II. 5 Data Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Sektor Pertanian	5.124
2	Sektor Peternakan	12
3	Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	34
4	Sektor Perdagangan	12
5	Sektor Jasa	139
Total		5.321

Sumber: Monografi Desa Terong 2024

Seperti dijelaskan sebelumnya, tingkat pendidikan berpengaruh besar terhadap jenis pekerjaan yang dijalani masyarakat. Di Kalurahan Terong, jumlah petani mencapai 5.124 orang, angka yang sangat besar untuk ukuran sebuah kalurahan. Hal ini menunjukkan dominasi sektor pertanian dan potensi ketimpangan sosial ekonomi, terutama jika dikaitkan dengan status sosial masyarakat. Meski bertani bukan pekerjaan yang keliru, pemerintah perlu menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas

pengembangan ekonomi, agar hasil pertanian memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, kehadiran Wisata Hutan Pinus Pengger seharusnya menjadi peluang ekonomi baru. Namun, dalam praktiknya hanya Padukuhan Sendangsari yang aktif terlibat dalam pengelolaan, karena sejak awal turut serta dalam pembangunan ekowisata tersebut. Sayangnya, pengelolaan kawasan hutan masih belum mencerminkan prinsip sumber daya bersama, yang semestinya melibatkan lebih banyak pihak untuk tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Keadaan Sosial dan Ekonomi

1. Kondisi Sosial

Masyarakat Kalurahan Terong masih menjunjung tinggi nilai gotong royong dan budaya Jawa sebagai bagian dari identitas sosial yang kuat. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan budaya seperti Bersih Desa, Jathilan, Ketoprak, dan kesenian tradisional lainnya yang tetap dilestarikan secara turun-temurun. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk pelestarian budaya, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarwarga dan memperkuat rasa kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal pembangunan, Kalurahan Terong tetap memegang prinsip musyawarah mufakat, mulai dari tingkat RT hingga ke tingkat Musyawarah Kalurahan (Muskal).

Pendekatan partisipatif ini mencerminkan semangat demokrasi lokal dan keterlibatan warga dalam setiap proses pengambilan keputusan. Secara

potensi, Kalurahan Terong dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan pertanian subur, serta destinasi ekowisata yang mulai dikenal luas, seperti Hutan Pinus Pengger dan Gunung Mungker. Selain itu, keberadaan pasar desa yang dikelola oleh BUMDesa turut menjadi pusat kegiatan ekonomi warga. Komoditas pertanian seperti padi, jagung, ketela, dan palawija merupakan hasil utama yang tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi penopang utama perekonomian masyarakat. Ke depan, potensi ini dapat terus dikembangkan melalui integrasi antara sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

2. Tingkat Kesejahteraan Kalurahan Terong

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kalurahan Terong dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti pendidikan, pendapatan ekonomi, sanitasi, dan gaya hidup sehari-hari. Jika faktor-faktor tersebut terpenuhi dengan baik, maka masyarakat dianggap sejahtera, dan sebaliknya. Pemerintah mengkategorikan kesejahteraan berdasarkan kebutuhan dasar dan taraf hidup, sesuai dengan data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menjadi acuan dalam program-program pembangunan sosial. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan di Kalurahan Terong sebagai berikut:

Tabel II. 6 Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Terong

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1	Keluarga Pra Sejahtera	305 Keluarga
2	Keluarga Sejahtera 1	501 Keluarga
3	Keluarga Sejahtera 2	810 Keluarga
4	Keluarga Sejahtera 3	200 Keluarga
5	Keluarga Sejahtera 3 plus	40 Keluarga
Total		1.856 Keluarga

Sumber: Data Profil Desa Terong 2024

Data ini menunjukkan keragaman tingkat kesejahteraan di Kalurahan Terong, mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang beragam di antara warganya. Meski sebagian besar keluarga sudah mencapai taraf sejahtera, masih terdapat kelompok yang memerlukan perhatian lebih dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pengembangan psikologis. Hal ini menegaskan pentingnya program-program pemberdayaan yang tidak hanya fokus pada aspek materi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh, termasuk pendidikan, kesehatan mental, dan partisipasi sosial. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan kesenjangan kesejahteraan dapat diminimalisir dan seluruh warga Kalurahan Terong dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.

3. Tingkat Kemiskinan Masyarakat Desa Terong berdasarkan Kepala Keluarga (KK).

Kemiskinan di Kalurahan Terong dipandang secara komprehensif meliputi pendapatan keluarga, akses pendidikan, kebutuhan dasar, dan layanan kesehatan. Kondisi ini seringkali disebabkan sulitnya keluarga

mengakses pekerjaan layak, terkait tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya mengubah pola pikir tetapi juga menjadi kunci pengentasan kemiskinan melalui pengembangan keterampilan dan bidang yang ditekuni. Untuk mengetahui data kemiskinan Kalurahan Terong dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II. 7 Data Tingkat Kemiskinan KK Desa Terong

No	Nama Padukuhan	Jumlah (KK)
1	Padukuhan Pancuran	76 KK
2	Padukuhan Sandang Sari	68 KK
3	Padukuhan Terong I	30 KK
4	Padukan Rejosari	25 KK
5	Padukuhan Saradan	51 KK
6	Padukuhan Pencit Rejo	74 KK
7	Padukuhan Kebokuning	37 KK
8	Padukuhan Terong II	61 KK
9	Padukuhan Ngenep	37 KK
TOTAL		459 KK

Sumber: <http:Terong-.Bantul.Desa.id/first2024>

Situasi ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi dari potensi wisata di Kalurahan Terong. Meskipun ekowisata Pinus Pengger memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja, kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan menyebabkan manfaat ekonomi tidak merata. Kondisi ini menuntut adanya peran aktif pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata, sehingga hasilnya dapat meningkatkan

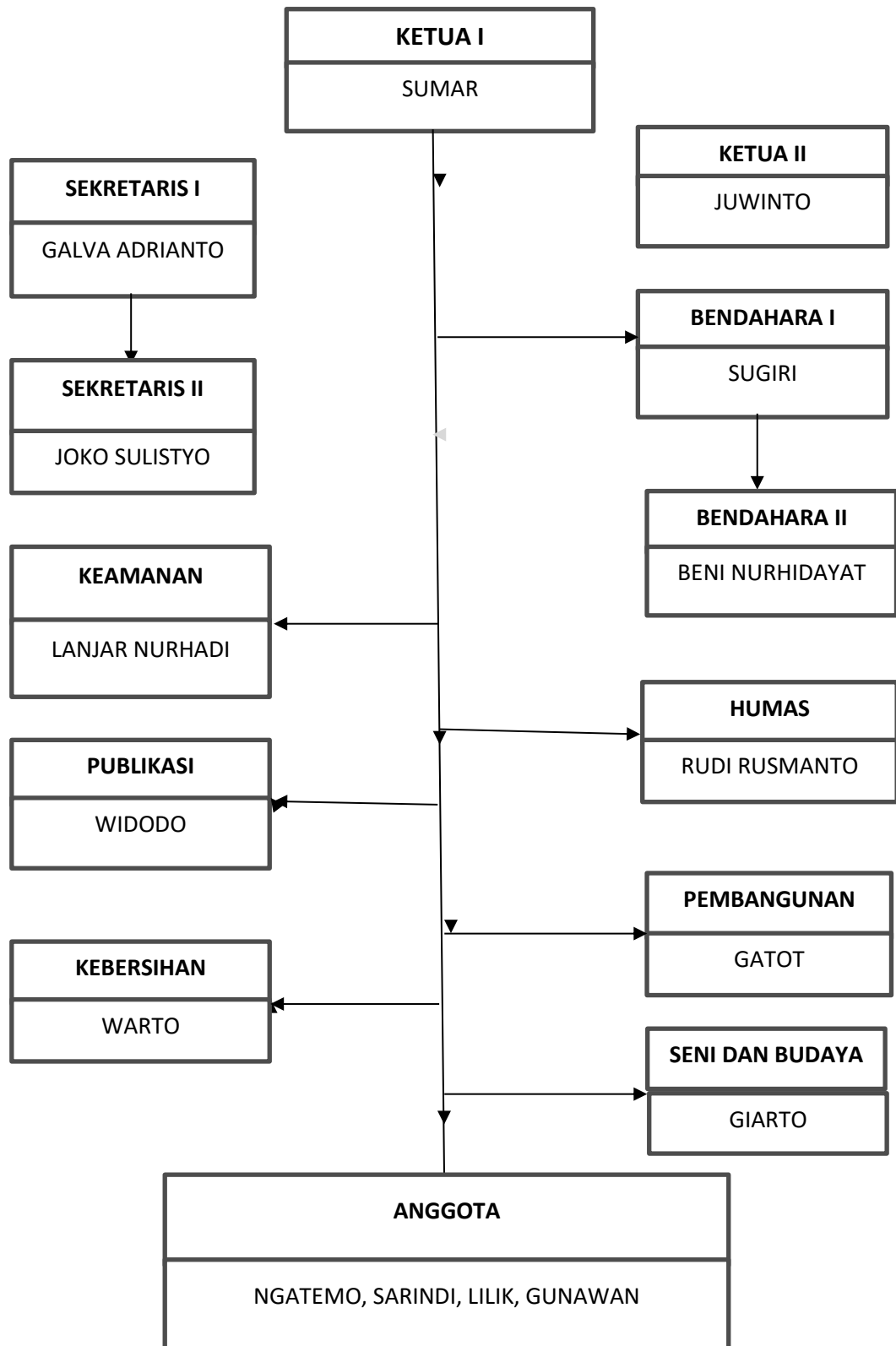
kesejahteraan seluruh warga, terutama di Padukuhan Sendang Sari. Pendekatan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat secara langsung dalam pengembangan ekowisata menjadi kunci penting untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan yang inklusif.

E. Profil Kelompok Sadar Wisata Pinus Pengger (POKDARWIS)

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kalurahan Terong dibentuk pada tahun 2016 sebagai lembaga yang bertugas mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata desa. POKDARWIS berperan aktif dalam pengelolaan, promosi, serta peningkatan fasilitas wisata guna memaksimalkan sumber daya yang ada di desa. Tujuan utama pembentukan kelompok ini adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang kerja lokal, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Kalurahan Terong.

POKDARWIS ini awalnya terbentuk atas usulan masyarakat Dusun Sendang Sari dan kemudian secara resmi dikukuhkan melalui Peraturan Desa (PERDES) Nomor 7 Tahun 2018, tertanggal 18 Maret 2016. Kelompok ini sebelumnya dikenal sebagai Kelompok Tani Pinus Sari Blok Terong dan kemudian bertransformasi menjadi penggerak utama dalam pengembangan ekowisata desa, khususnya di kawasan Pinus Pengger.

Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata Hutan Pinus Pengger



Sumber: Profil Pokdarwis wisata Pinus Pengger 2024

F. Profil Wisata Pinus Pengger

1. Latar belakang

Wisata Pinus Pengger di Kalurahan Terong berawal dari inisiatif pemuda Dusun Sendangsari pada Januari 2016, terinspirasi dari keberhasilan wisata Mangunan. Para pemuda membuka akses ke kawasan hutan lindung sebagai calon lokasi wisata, meski sempat terkendala perizinan. Setelah melalui proses panjang, izin diberikan melalui kerja sama dengan Koperasi Notowono, lembaga pengelola wisata di Mangunan. Wisata ini resmi dibuka pada 7 April 2016 dan mulai menerapkan tiket retribusi pada 12 Februari 2017. Pinus Pengger menjadi bagian dari wilayah kelola KPH Yogyakarta dengan luas 15.581 ha dan berada di bawah RPH Mangunan, mencakup tiga blok: Kediwung, Terong, dan Mangunan. Lokasinya berada di Dusun Sendangsari, Kalurahan Terong, berjarak 25 km dari Kota Yogyakarta.

Pinus Pengger termasuk dalam tujuh destinasi wisata alam di kawasan Mangunan yang bekerja sama dengan Pemda DIY melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemanfaatan hutan produksi dan lindung. Berdasarkan kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan Koperasi Notowono, sistem bagi hasil ditetapkan: 75% untuk koperasi dan 25% untuk Pemerintah DIY. Pengelolaan lapangan dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dusun Sendangsari sebagai operator Koperasi Notowono. Pokdarwis yang diketuai oleh Sumar beranggotakan 41 orang, mayoritas pemuda lokal.

Mereka bertugas menjaga kebersihan, pelayanan wisata, parkir, keamanan, dan edukasi lingkungan. Sejak 2016 hingga 2023, berbagai fasilitas terus dikembangkan, seperti spot foto, area camping, ayunan, gazebo, mushola, toilet, warung makan, dan area parkir kendaraan roda dua maupun empat. Wisata Pinus Pengger kini menjadi destinasi unggulan, meskipun tantangan dalam pemerataan manfaat ekonomi bagi warga sekitar masih perlu mendapat perhatian.

2. Data Pengunjung dan Pendapatan Wisata Pinus Pengger

Data pengunjung dan pendapatan merupakan indikator penting untuk menilai kemajuan suatu objek wisata. Keduanya tidak hanya mencerminkan tingkat kunjungan, tetapi juga keberhasilan pengelolaan dan potensi ekonomi wisata tersebut. Pada Wisata Pinus Pengger, sejak diresmikan tahun 2016 hingga 2024, data pengunjung dan pendapatan tahunan dapat memberikan gambaran perkembangan serta dampak ekonomi yang dihasilkan. Tabel berikut menunjukkan tren kunjungan dan pendapatan, yang menjadi dasar evaluasi keberhasilan pengelolaan wisata ini.

Tabel II. 8 Data Pengunjung dan Pendapatan

No	Tahun	Pengunjung	Pendapatan
1	2021	10.800	Rp 162.000.000
2	2022	21.960	Rp 329.400.000
3	2023	25.200	Rp 428.400.000
4	2024	29.520	Rp 501.840.000
Total		87.480	Rp 1.421.640

Sumber Data: Laporan Tahunan Wisata Pinus Pengger 2025

Dari tabel 9 terlihat peningkatan signifikan pengunjung dan pendapatan Wisata Pinus Pengger dalam empat tahun terakhir (2021-2024). Tahun 2021 tercatat 10.800 pengunjung dengan pendapatan Rp162 juta. Jumlah ini hampir dua kali lipat pada 2022, mencapai 21.960 pengunjung dan Rp329,4 juta pendapatan. Tren positif berlanjut pada 2023 dengan 25.200 pengunjung dan Rp428,4 juta, lalu meningkat lagi di 2024 menjadi 29.520 pengunjung dan Rp501,84 juta pendapatan. Secara keseluruhan, antara 2022 hingga 2024, jumlah pengunjung naik hingga 87,65% dengan total 76.680 pengunjung, sementara pendapatan mencapai lebih dari Rp1,25 miliar. Data ini menunjukkan pertumbuhan pesat Wisata Pinus Pengger, menandakan keberhasilan pengelolaan dan potensi ekonomi yang terus berkembang, sekaligus menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat sekitar.

BAB III
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA HUTAN
PINUS PENGGER

A. Deskriptif Informan

Subjek penelitian ini adalah informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan Wisata Pinus Pengger. Informan berasal dari masyarakat Padukuhan Sendang Sari, Kalurahan Terong, yang terlibat sejak pembangunan wisata hutan ini dimulai pada 2016 hingga sekarang. Selain itu, penelitian juga melibatkan pemerintah setempat yang memiliki kewenangan atas wilayah administrasi kalurahan, khususnya terkait pengelolaan hutan lindung sebagai objek pariwisata.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi langsung terkait permasalahan dan dinamika pengelolaan wisata. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi aktual serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Wisata Pinus Pengger.

Data primer tersebut kemudian disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan.

Tabel III. 1 Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Sugiyono	61	Lurah terong
2.	Suyati	53	Dukuh Sendang Sari
3.	Sumar	42	Pengelola Pinus Pengger
4.	Dwi	35	Masyarakat bagian loket tiket
5.	Sariyanto	44	Masyarakat
6.	Siti	38	Pedagang di Hutan Pinus Pengger
7.	Sugiri	36	Masyarakat
8.	Yanti	40	Pedagang
9.	Ngadyo	39	Masyarakat
10.	Eka	32	Masyarakat
11.	Yati	43	Pedagang

Sumber: Monografi Kalurahan Terong 2024

B. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger melalui Partisipasi Pikiran, Tenaga, Harta Benda, Keterampilan, dan Sosial.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, telah menjadi model pemberdayaan berbasis komunitas yang sukses. Masyarakat Desa Terong terlibat aktif dalam berbagai aspek pengembangan Hutan Pinus Pengger antara lain: Melalui pertemuan rutin dan diskusi, warga memberikan ide-ide kreatif untuk pengembangan wisata, termasuk desain ikon wisata. Pengelolaan wisata Hutan Pinus Pengger tidak hanya melibatkan tenaga atau fisik masyarakat, tetapi juga peran aktif mereka dalam menyumbangkan gagasan, ide, dan pemikiran. partisipasi masyarakat

dalam perencanaan yang meliputi partisipasi pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, dan partisipasi sosial

Kontribusi pikiran masyarakat ini menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mendorong perkembangan wisata yang berkelanjutan dan berbasis lokal.

Berikut ini adalah wawancara dengan Bapak Sumar:

“Warga sering mengusulkan ide-ide baru dalam rapat pokdarwis misalnya ide membuat Spot Foto Ikonik seperti tangan raksasa (panca warna), lingkaran cahaya, jembatan Pinus Pengger, dan Rumah Pohon itu berasal ide anak-anak Desa mbak. bahan-bahan untuk pembuatan spot foto itu dari Ranting pohon yang kemudian kita rancang menjadi sebuah karya baru mba. tahan lama minimal enam Bulan harus ganti mba. kita ingin Hutan Pinus Pengger ini punya daya tarik yang khas tapi tetap ramah lingkungan”. (Wawancara, 11 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sumar selaku Ketua Pengelola Objek Wisata Hutan Pinus Pengger dapat disimpulkan bahwa kontribusi pemikiran masyarakat memegang peranan penting dalam pengelolaan Objek wisata Hutan Pinus Pengger. Masyarakat tidak hanya berperan secara fisik dalam operasional lapangan, tetapi juga aktif menyumbangkan ide dan gagasan dalam pengembangan destinasi wisata. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Suyati selaku Dukuh di Padukuhan Sendang Sari:

“Kami sebagai pemerintah juga berharap masyarakat terus kreatif dan berani menyampaikan ide karena wisata milik bersama jadi kami butuh pemikiran dari berbagai lapisan baik itu dari pemuda-pemudi, ibu-ibu maupun petani, semakin banyak ide semakin bersemangat untuk menjalankan kegiatan di wisata ini”. (Wawancara, 11 Februari 2025).

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan Objek wisata Hutan Pinus Pengger tidak terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan masukan, gagasan dan solusi. Yang walaupun masih terdapat masyarakat yang tidak terlibat akan tetapi pemerintah Dan pengelola selalu mengharapkan agar seluruh masyarakat ikut terlibat dalam menyumbangkan gagasan dan idenya demi kemajuan objek Wisata Hutan Pinus Pengger hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Bu Eka.

“Kami di sini bukan cuma jualan mbak tapi juga ikut berpikir soal gimana supaya wisata ini terus berkembang. Jadi bukan cuma jualan dan kerja saja tapi ikut musyawarah warga yang bahas soal bahas pengelolaan”.(Wawancara, 13 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu penjual di kawasan Hutan Pinus Pengger dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dan signifikan dalam pengelolaan objek Wisata kontribusi pemikiran masyarakat tidak hanya sebatas saran namun juga diwujudkan dalam berbagai aspek seperti pengelolaan dan pengembangan wisata masyarakat Terong terlibat dalam memberikan ide-ide kreatifnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kontribusi masyarakat memiliki peranan penting dalam pengelolaan objek wisata berbasis lokal masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi di sekitar kawasan wisata, tetapi juga menjadi bagian dari proses perencanaan, pengambilan keputusan hingga pelaksanaan kegiatan pengelolaan. Pemikiran masyarakat yang diwujudkan melalui forum musyawarah, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan partisipasi langsung

dalam aktivitas wisata menunjukkan bahwa pengelolaan yang bersifat partisipatif lebih mampu menciptakan keberlanjutan. Masyarakat Kalurahan Terong memberikan ide-ide yang memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi seperti pengembangan spot Foto wisata yang tidak merusak lingkungan, pengelolaan sampah, pembagian peran kerja dan pengembangan usaha mikro.

Masyarakat di Kalurahan Terong selalu ikut gotong royong untuk pembangunan fasilitas objek wisata seperti pembuatan spot foto dan area wisata lainnya. Kontribusi tenaga menjadi pondasi penting dalam pengelolaan objek wisata yang berbasis komunitas selain mengurangi ketergantungan pada pihak luar keterlibatan masyarakat dalam berkontribusi tenaga ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab serta membuka peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Ngadyo:

“Masyarakat disini banyak yang bantu tenaga langsung misalnya saya sendiri, tiap pagi ikut bersih-bersih area wisata mba, terus angkat sampah ada juga yang lain yang jaga parkir, jaga pintu masuk, ngarahin pengunjung masuk kedalam arena wisata” (Wawancara, 19 Maret 2025).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ngadyo memberikan gambaran yang jelas bahwa kontribusi tenaga masyarakat merupakan salah satu pilar penting keberhasilan pengelolaan objek wisata berbasis lokal. Masyarakat Kalurahan Terong berperan aktif dalam bentuk kerja harian maupun gotong royong, menunjukkan adanya kesadaran kolektif dan rasa memiliki yang tinggi terhadap kawasan wisata. Menariknya sebagian besar kontribusi ini

dilakukan tidak hanya karena kewajiban kerja tetapi karena inisiatif dan kepedulian. Ini mencerminkan bahwa pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger tumbuh dalam kerangka partisipatif, masyarakat Terong tidak sekedar menjadi objek pembangunan tetapi berubah menjadi subjek aktif dan mandiri. Namun demikian perlu dicatat bahwa keberlanjutan kontribusi ini sangat bergantung pada adanya penghargaan, pelatihan, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara menyeluruh. Masyarakat yang merasa dihargai kontribusinya akan lebih termotivasi untuk terus menjaga dan mengembangkan kawasan wisata secara mandiri. Dengan demikian, peneliti menilai bahwa kontribusi tenaga masyarakat merupakan elemen kunci dalam pengelolaan Objek Wisata berbasis Komunitas. Upaya penguatan kapasitas dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal harus menjadi prioritas dalam kerangka pengembangan wisata yang berkelanjutan. Berikut wawancara peneliti dengan Sariyanto:

“Kami diberi ruang untuk terlibat seperti bersih-bersih, di lingkungan wisata, sambil memantau apa saja yang perlu dikerjakan mbak. Harapan saya pemerintah dan pengelola terus melibatkan warga masyarakat nggak hanya bersih-bersih tetapi juga dalam pengambilan keputusan”. (Wawancara, 19 Maret 2025)

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menemukan bahwa kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga memegang peranan penting dalam pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pinus Pengger. Keterlibatan masyarakat seperti yang dilakukan pak Sariyanto menunjukkan adanya rasa

tanggung jawab, kepedulian dan semangat gotong royong yang tinggi.

Kemudian selaras yang disampaikan oleh Bapak Sumar:

“Peran masyarakat sangat besar mbak. Sejak awal dibukanya tempat ini hampir semua pekerjaan dasar dilakukan secara gotong royong. Mulai dari membuka jalur jalan, membuat spot foto, sampai menjaga kebersihan dan keamanan kawasan wisata”.(Wawancara, 11 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga merupakan pondasi utama dalam pengelolaan dan perkembangan objek wisata Hutan Pinus Pengger. Bapak Sumar menjelaskan bahwa sejak awal pembentukan kawasan wisata masyarakat Terong telah menunjukkan partisipasi aktif melalui kerja gotong royong pembangunan fasilitas, dan pengelolaan lapangan secara langsung. Saat ini kontribusi tenaga masyarakat tetap berlanjut dalam bentuk peran-peran operasional seperti kebersihan, keamanan, pengelolaan tiket, parkir dan layanan pengunjung. Pengelola juga menyadari pentingnya dukungan eksternal berupa pelatihan dan insentif, mengingat sebagian besar masyarakat belum memiliki latar belakang pariwisata secara profesional. Oleh karena itu penguatan kapasitas dan dukungan kelembagaan sangat diperlukan agar kontribusi tenaga masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.

Penyediaan tempat untuk pertemuan rutin dan kegiatan komunitas mendukung kelancaran Operasional Wisata. Seperti pembangunan Gazebo dan Rumah panggung untuk dijadikan wadah tempat bermusyawarah. Partisipasi ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama

antar warga masyarakat dan pemerintah serta pengelola objek wisata Hutan Pinus Pengger terhadap keberhasilan wisata tersebut. Kontribusi masyarakat dalam bentuk sarana merujuk pada partisipasi warga dalam menyediakan atau membangun fasilitas fisik yang digunakan untuk mendukung operasional dan kenyamanan di kawasan wisata. Kontribusi ini dapat berupa penyediaan langsung, pembangunan mandiri, atau gotong royong dalam menciptakan sarana-sarana penunjang wisata seperti pembangunan spot foto, penyediaan tempat sampah, pembuatan tempat duduk, pembuatan jalan setapak untuk akses masuk, pembangunan warung dan kios UMKM. Berikut wawancara dengan Ibu Siti sebagai pedagang:

“Ya tentu mbak banyak fasilitas disini yang dibangun bareng-bareng. Waktu awal-awal kami warga ikut bantu bikin jalan setapak, tempat duduk dari batang pohon dan sebagian juga buat spot foto dari bahan-bahan yang ada di sekitar hutan. Iya saya dulu bangun warung kecil ini biaya sendiri mbak”.(Wawancara, 19 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kontribusi masyarakat dalam bentuk sarana memiliki peran penting dalam mendukung kenyamanan dan keberlanjutan pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger. Masyarakat tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga ikut menyediakan fasilitas fisik seperti warung, tempat duduk, kios sederhana, bahkan spot foto yang dibuat secara mandiri dengan bahan Lokal. Selain itu kontribusi sarana dari masyarakat juga secara langsung mendukung pengalaman wisata yang lebih baik bagi pengunjung serta membuka peluang ekonomi lokal. Namun warga masyarakat masih berharap adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah agar sarana yang disediakan bisa

lebih banyak, aman dan berdaya guna dalam jangka waktu panjang. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Yanti:

“Ya mba kalau untuk sarana prasarana sudah lumayan lah ya tapi berharap juga nanti ke depan ada lah yang dipake yang bisa bertahan lama saja mbak seperti tempat duduk dan spot-spot foto”.(Wawancara, 19 Maret 2025)

Berdasarkan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pedagang di kawasan memiliki peran aktif dalam penyediaan sarana namun mereka menyimpan banyak harapan terhadap pengembangan fasilitas di masa depan, agar partisipasi warga tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang secara mandiri dan profesional.

Pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger mengadopsi pendekatan ekowisata berbasis masyarakat dengan fokus pada pembentukan kelembagaan seperti pembentukan struktur pengelola wisata yang melibatkan anggota masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Masyarakat diikutsertakan dalam pelatihan dan pemberdayaan, pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan, seperti pembuatan kerajinan lokal dan pengenalan jenis tumbuhan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola wisata dengan memanfaatkan potensi lokal yang menggunakan bahan-bahan lokal dalam pembangunan dan menyajikan produk lokal sebagai bagian dari pengalaman wisata. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas wisata tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial.

Keberadaan Hutan Pinus Pengger memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan begitu masyarakat dapat membuka peluang untuk usaha baru seperti membuka warung makan, membuat souvenir untuk pengunjung sebagai kenangan, menyewakan alat-alat camping, dan menjadi pemandu wisata dengan demikian dapat mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang.

Secara keseluruhan, Hutan Pinus Pengger menjadi contoh sukses dari pengelolaan objek wisata yang melibatkan masyarakat secara aktif. Melalui partisipasi inklusif, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi budaya. Wisata ini tidak hanya menarik bagi pengunjung tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan perlu ditumbuhkan melalui forum yang mendukung masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pikiran atau gagasan terhadap program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa itu sendiri. Dengan adanya forum sebagai wadah masyarakat untuk menyalurkan pikiran diharapkan masyarakat leluasa dalam memberikan informasi apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, kondisi yang dialami, sikap masyarakat setempat.

Sehingga pihak Kalurahan bisa dapat memperoleh informasi dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakatnya. Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger di bawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Lurah Pak Sugiyono selaku Lurah di Kalurahan Terong.

“Dulu awalnya sebelum dijadikan wisata hutan pinus itu adalah hutan lindung yang kemudian sudah tidak dipakai untuk produksi, artinya terbengkalai sehingga warga masyarakat setempat bergotong royong untuk membersihkan area wilayah dengan memotong ranting-ranting pohon, pembukaan dan pengelolaan wisata itu dulu bukan dari pemerintah tapi swadaya masyarakat itu sendiri Iuran misalnya, bahkan sampai pengurusnya mencari pinjaman untuk mengelola dengan menggadaikan sertifikat atau barang lainnya dari anggota pengelola itu, kemudian tahun demi tahun semakin maju kemudian pemerintah juga ikut sadar disitu ada potensi yang dikembangkan sehingga sampai sekarang ada CSR masuk, dan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata DIY sampai sekarang ini menjadi wisata andalan di Kalurahan Terong. Wisata itu dikelola oleh masyarakat. Masyarakat bebas beraspirasi dan berpendapat dan ikut serta dalam perencanaan pengelolaan, masyarakat selalu diberi ruang dan tempat di forum untuk menyuarakan apapun yang dilihatnya dan memiliki kebebasan untuk berpendapat dalam forum, artinya masyarakat tidak pernah dibatasi dalam memberikan masukan begitupun sebaliknya masyarakat selalu terlibat dalam perencanaan pengelolaan wisata Hutan Pinus Pengger ini Mbak”.(Wawancara, 6 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pada dasarnya masyarakat sudah berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata hutan pinus pengger dari awal pembangunan hingga saat ini, dan juga pemerintah setempat selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dan pembangunan objek wisata pinus pengger. Bentuk upaya Kalurahan dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi terlihat dengan diadakannya musyawarah desa yang dimana kalurahan membentuk tim perumusan namanya RPJMKal kemudian tim inilah yang menampung ide-ide atau gagasan dari masyarakat, rumusan yang diambil sesuai dengan prioritas atau

kebutuhan yang mendasar untuk perencanaan pembentukan objek wisata Hutan Pinus Pengger. Meskipun masyarakat sudah dilibatkan untuk berpartisipasi akan tetapi masyarakat yang dilibatkan hanya tokoh-tokoh penting atau perwakilan saja sehingga partisipasi masyarakat dalam perencanaan belum dilakukan dengan maksimal.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Sumar selaku Ketua POKDARWIS (Pengelola Objek Wisata Pinus Pengger):

“Masyarakat lokal selalu dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan objek wisata Pinus Pengger karena masyarakat lokal memiliki peran penting seperti menjadi pemandu wisata, pengelola fasilitas, dan penjual produk lokal. Masyarakat juga dapat memberikan kontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan kami memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki kesempatan yang sama dalam pengelolaan objek wisata ini melalui pertemuan dan diskusi rutin dengan kita bermusyawarah kita akan mendapatkan saran dan juga ide untuk keberlanjutan dari rencana yang sudah kita buat untuk membuat objek wisata ini lebih baik lagi kedepannya Mbak”.(Wawancara, 11 Februari 2025)

Dari hasil wawancara di atas bahwa memang yang ikut berpartisipasi di awal pembangunan objek wisata adalah masyarakat Padukuhan Sendang Sari dan dari beberapa padukuhan yang ada di Kalurahan Terong. Dengan adanya partisipasi masyarakat dan pemerintah Kalurahan mengharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dan memiliki rasa tanggung jawab untuk nantinya memelihara serta mengembangkan objek Wisata Hutan Pinus Pengger tersebut.

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembentukan objek wisata hutan pinus pengger berupa masukan-masukan atau ide-ide untuk dipertimbangkan

dalam pembangunan objek wisata hutan Pinus Pengger tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Desa merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas masyarakat Desa. Hal inilah yang menjadikan masyarakat harus dilibatkan oleh pemerintah Kalurahan dalam setiap kegiatan ataupun perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di Desa, keterlibatan masyarakat ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut terlibat dalam segala kegiatan Kalurahan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembentukan objek wisata Hutan Pinus Pengger inilah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di Kalurahan Terong. Kemudian wawancara dengan mbak Siti pedagang di hutan Pinus Pengger.

“Kalau untuk proses perencanaan kami masyarakat selalu ikut dilibatkan karena di awal pembangunan dan pembentukan pengelolaan wisata kami masyarakat selalu dilibatkan mbak. Walaupun awal pembersihan lahan dan pembentukan objek wisata hutan Pinus Pengger saya tidak ikut akan tetapi setelah itu saya ikut berpartisipasi mbak seperti pada saat ada musyawarah dan diskusi pasti kami juga memberikan saran atau pendapat tentang rencana pengelolaan karna saya sebagai pedagang pasti punya keinginan seperti membangun warung dan lain-lain mba”.(Wawancara, 13 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa adanya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam perencanaan pengelolaan

objek wisata dengan mengikuti musyawarah yang dilakukan di Kalurahan Terong. Walaupun pada awal pembentukan objek wisata hutan Pinus Pengger belum terlibat musyawarah karena pada saat pembentukan masyarakat yang dilibatkan hanya beberapa lapisan masyarakat saja. Akan tetapi masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk selanjutnya ikut musyawarah dan turut terlibat untuk memberikan ide-ide atau gagasannya untuk pengembangan objek wisata hutan pinus pengger. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Bapak Suyati selaku Dukuh.

“Untuk perencanaan dan pengelolaan dilakukan oleh bagian Pokdarwis yaitu bekerja sama dengan kepala RPH Mangunan. Kami melakukan pendekatan dengan masyarakat sehingga masyarakat diberikan pelatihan dari berbagai hal seperti pengelolaan wisata, parkir, dan penjagaan lingkungan sehingga masyarakat benar-benar paham tentang pentingnya ekonomi dari wisata dan menjaga lingkungan. Karena wisata pinus pengger ini sudah mulai dibentuk sejak tahun 2016, maka kita sudah mulai dari awal melakukan pelatihan-pelatihan sehingga sampai sekarang masyarakat sudah paham cara berpariwisata dengan baik, namun masih ada sebagian masyarakat yang tidak ikut karena kesibukannya masing-masing. Untuk sejauh ini objek wisata Pinus Pengger ini termasuk yang paling ramai di Kalurahan Terong”.(Wawancara, 11 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat ikut serta terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan objek wisata pada awal pembentukan, tetapi hanya segelintir orang saja yang sekiranya dipercaya perwakilan masyarakat dalam menentukan apakah bekas hutan produksi akan dialihfungsikan menjadi objek wisata. Akan tetapi sesuai dengan temuan peneliti saat melakukan wawancara memang pada awal pembentukan objek wisata Hutan Pinus pengger tidak semua masyarakat berpartisipasi turut serta dalam musyawarah pembentukan awal

objek wisata Hutan Pinus Pengger ini namun setelah menjadi objek wisata Hutan Pinus Pengger pada tahun 2016 masyarakat ikut mengelola atau mengurus objek wisata Hutan Pinus Pengger ini dengan membentuk kepengurusan yang terdiri dari ketua dan staf.

Seperti yang diamati peneliti Anggota Kelompok Tani Pinus sari Blok Terong ini kebanyakan terdiri dari laki-laki akan tetapi ada juga pengurus perempuan ini biasanya berada di bagian Tiket memberikan tiket pada para pengunjung objek wisata Hutan Pinus Pengger.

Selain tergabung dalam kepengurusan ada beberapa masyarakat kalurahan Terong yang membuka usaha kuliner di wilayah Objek Wisata Hutan Pinus Pengger, para masyarakat yang membuka kuliner ini memiliki masing-masing warung dengan jenis kuliner yang berbeda setiap warungnya, di bawah ini wawancara dengan dengan salah satu pemilik kuliner yaitu Ibu Yanti yang berada di objek wisata Hutan Pinus pengger:

“Kami selalu dilibatkan dalam rencana pengelolaan objek wisata ini lewat musyawarah di Kalurahan. Khusus Kuliner kami juga punya ketua, sekretaris, bendahara itu kami sebulan sekali orang-orang kuliner itu berkumpul dan bermusyawarah di sini membahas bagaimana menghadapi pengunjung, bagaimana mempertahankan kuliner dan juga bagaimana rencana kedepannya untuk terus berkembang dan yang berkaitan dengan kuliner yang kami tawarkan kepada para pengunjung”.(Wawancara, 11 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan salah satu penggiat kuliner di wisata Hutan Pinus Pengger yang bernama Ibu Yanti bisa dilihat bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi atau berkontribusi dalam pengembangan objek wisata Hutan Pinus Pengger melalui musyawarah-musyawarah yang ada. Walaupun pada awal

pembentukan objek wisata tidak semua turut terlibat tetapi masyarakat memiliki kesadaran untuk turut mengembangkan objek wisata Hutan Pinus Pengger tersebut. Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Objek Wisata masih kurang dan masih belum bisa dikatakan maksimal hal ini dapat peneliti katakan karena berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat yang bernama Ibu Yati selaku salah satu pemilik warung di pinggir jalan objek wisata Hutan Pinus Pengger:

“Kalau musyawarah saya tidak pernah ikut tentang objek wisata hutan pinus pengger tersebut, tapi yang ikut musyawarah ya orang-orang yang kerja hutan pinus itu”.(Wawancara, 13 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwasannya masyarakat yang biasanya turut terlibat kebanyakan mereka-mereka yang langsung dengan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger contohnya seperti pihak kalurahan, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus, serta masyarakat yang penggiat usaha yang berada di dalam objek wisata Hutan Pinus pengger. Mereka-mereka inilah yang turut terlibat dalam musyawarah yang berkaitan dengan objek wisata Hutan Pinus Pengger yang dimana seharusnya masyarakat Kalurahan Terong bukan hanya segelintir orang-orang itu saja akan tetapi seluruh masyarakat yang ada di Kalurahan Terong dalam memberikan aspirasi ataupun ide-ide gagasan hal ini bisa dikatakan tidak maksimal melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa dalam partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Objek Wisata Hutan

Pinus Pengger dilakukan dengan mewakilkan beberapa masyarakat dalam forum musyawarah yang dilakukan di Kalurahan Terong. Masyarakat yang dipilih untuk menjadi perwakilan adalah masyarakat yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memberikan aspirasinya.

Hal ini akhirnya membuat prinsip keterwakilan ini belum membangun kesetaraan bagi masyarakat. Masih adanya kesenjangan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger bagi masyarakat di Kalurahan Terong, hal ini dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat yang terlibat dalam forum musyawarah dengan masyarakat yang tidak memiliki kesempatan aspirasinya terwakilkan maka dalam model prinsip keterwakilan pada forum musyawarah di Kalurahan Terong hanya bersifat realistik dari proses berbagi dan mengambil bagian dari aktivitas forum pembuatan musyawarah perencanaan pengelolaan Objek Wisata.

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengorganisasian Pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger.

Keterlibatan masyarakat dalam pengorganisasian pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger sangat penting untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan memberdayakan warga lokal tidak hanya sebatas partisipasi fisik atau ekonomi semata, tetapi mencakup dimensi sosial, budaya, politik dan lingkungan yang saling berintegrasi. Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) melibatkan masyarakat berarti mereka akses, Kontrol, dan manfaat atas sumber daya. Warga Kalurahan Terong tidak hanya

menjadi pekerja, tetapi aktor utama yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dan pengembangan wisata.

Dengan dilibatkannya masyarakat Kalurahan Terong dalam organisasi dan manajemen, distribusi keuntungan menjadi lebih adil dan untuk mencegah eksploitasi oleh pihak luar dan menciptakan sistem ekonomi yang inklusif karena masyarakat adalah penjaga identitas budaya dan ekologi kawasan dengan melibatkan warga masyarakat lokal juga untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan, menghargai alam dan nilai tradisi setempat keterlibatan masyarakat dalam struktur pengorganisasian seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau koperasi lokal mengarah pada terbentuknya tata kelola yang kuat dan mandiri wisata yang dikelola bersama dapat memperkuat solidaritas sosial antar kelompok masyarakat, membangun jejaring serta memperkuat daya tahan ekonomi desa terhadap krisis.

Masyarakat dilibatkan dalam forum musyawarah desa atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk merencanakan pengembangan destinasi penentuan tarif, zonasi wisata, dan pengembangan fasilitas melibatkan warga lokal pengelolaan dan operasional setiap harian warga terlibat sebagai pengelola tiket, petugas parkir, pemandu wisata, atau pengelola warung dan kios oleh masyarakat dilibatkan dalam pengorganisasian pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger mulai dari pembentukan kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pengelola utama dan bertugas mengatur operasional, menjaga kawasan, dan mengelola pemasukan lalu warga diberi peran masing-

masing ada petugas parkir, loket tiket, kebersihan, pemandu dan pengelola warung/kuliner.

Pemuda Kalurahan menjadi bagian dari tim keamanan, kebersihan, dan promosi. Peneliti juga menemukan bentuk-bentuk partisipasi warga masyarakat dengan mengambil bagian masing-masing seperti terlibat dalam pelestarian lingkungan, menjaga kelestarian hutan, menanam pohon dan memberikan edukasi pada pengunjung, selain itu warga juga menciptakan spot foto ikonik dan kegiatan wisata kreatif yang menarik seperti instalasi seni dari kayu dan rerantingan dari pohon. Masyarakat juga mendapatkan ekonomi dari usaha kuliner, kerajinan tangan, dan jasa transportasi lokal dan juga UMKM lokal diberi ruang untuk berkembang melalui stand atau kios resmi di area wisata. Pelestarian alam dan budaya serta kolaborasi dengan Pemerintah dan LSM Warga ikut menjaga kelestarian Hutan Pinus melalui kegiatan pelestarian lingkungan (reboisasi, pengelolaan sampah) masyarakat juga berperan penting dalam mempertahankan nilai-nilai lokal dan budaya dalam penyambutan wisatawan di sini pemerintah daerah memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan sarana melalui dinas pariwisata.

Di bawah ini merupakan wawancara peneliti dengan Mbak Dwi warga masyarakat Lokal di Kalurahan Terong:

“Saya terlibat mbak sebagai anggota pengelola objek wisata dan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mengelola objek wisata dan meningkatkan kualitas layanan, saya di bagian loket tiket masuk mbak”.(Wawancara, 14 Februari 2025)

Masyarakat Kalurahan Terong berperan dalam pengorganisasian pengelolaan objek wisata, warga lokal terlibat dalam berbagai cara mulai dari

perencanaan hingga pengawasan dan pelaksanaan peran aktif mereka menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan keberlanjutan pariwisata serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Sariyanto saat ditanyai mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata:

“Dari awal pengelolaan pariwisata ini saya ikut serta dan juga masuk dalam keanggotaan pengelola objek wisata, ikut serta dalam menentukan arah pengembangan pariwisata ini mbak, seperti menentukan visi dan misi dan tujuan pembangunan wisata ini, kalau untuk pengelola di sini itu memang penduduk lokal di sini cukup aktif. Kalau bicara partisipasi, itu sudah menjadi budaya di sini. Dalam hal pikiran, kami terlibat langsung dalam rapat-rapat perencanaan. ikut menyumbang ide saat menyusun struktur kepanitiaan, pembagian tugas, hingga menentukan prioritas kegiatan mbak. ”.(Wawancara, 14 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengorganisasian pengelolaan objek wisata bahwa pada dasarnya para pengelola Objek Wisata Hutan Pinus Pengger merupakan warga Kalurahan Terong itu sendiri sehingga segala kegiatan yang dilakukan di Kalurahan Terong sudah secara sadar dan terbuka dibicarakan kepada masyarakat oleh para pengelola pada pertemuan yang ada di Kalurahan Terong tempat para pengelola itu tinggal. partisipasi masyarakat melalui partisipasi pikiran memegang peranan penting sejak awal pembentukan kelompok pengelola wisata, masyarakat turut hadir dalam forum-forum musyawarah yang membahas struktur organisasi, pembagian tugas, hingga penyusunan aturan internal. Ide-ide kreatif dari warga, seperti pemanfaatan potensi alam sebagai spot swafoto, pengaturan arus kunjungan agar tidak merusak alam, dan usulan zona edukasi lingkungan, menjadi dasar pengembangan konsep wisata yang

berkelanjutan.hal ini juga menjadi bentuk pertanggung jawaban pengelola kepada masyarakat untuk senantiasa terbuka sehingga segala sesuatu yang akan direncanakan atau ada pembangunan yang akan dilakukan tidak bertolak belakang dengan masyarakat karena adanya keterbukaan tersebut untuk selalu melibatkan masyarakat dalam pengorganisasian pengelolaan pariwisata.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sugiri selaku anggota pengelola objek wisata:

“Ya, masyarakat sini terlibat langsung sejak awal. Kami ikut membantu persiapan lahan, membersihkan jalur masuk hutan, dan membangun fasilitas awal seperti tempat duduk, gardu pandang, sampai toilet. Semua dilakukan secara gotong royong.”(Wawancara, 19 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota masyarakat sekaligus anggota Pokdarwis, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengorganisasian pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger sangat menonjol, khususnya melalui partisipasi tenaga. Masyarakat terlibat langsung sejak tahap awal pengelolaan. Warga secara sukarela memberikan tenaganya untuk membantu persiapan lahan, membersihkan jalur masuk ke kawasan hutan, serta membangun fasilitas dasar seperti tempat duduk, gardu pandang, dan toilet. Semua kegiatan ini dilakukan secara gotong royong sebagai bentuk komitmen dan rasa memiliki terhadap keberadaan objek wisata. Hal ini mencerminkan bahwa tenaga kerja yang disumbangkan masyarakat bukan sekadar dukungan fisik, tetapi juga merupakan wujud dari kesadaran kolektif untuk mengembangkan potensi wisata lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

Pengorganisasian pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, masyarakat setempat dan pihak

pengelola seperti dari pihak pemerintah ada Dinas Pariwisata dan perhutani yang berperan dalam meregulasi, promosi dan pengembangan wisata. Selanjutnya ada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) organisasi masyarakat lokal yang dibentuk untuk mengelola operasional sehari-hari seperti menciptakan atraksi wisata seperti instalasi seni dari kayu (spot foto) acara budaya dan program edukatif.

Hal tersebut di atas juga sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Siti sebagai pengusaha warung di area wisata Hutan Pinus Pengger:

“Saya tidak hanya jualan di sini mbak, tapi juga ikut dalam rapat-rapat pengelola yang diadakan oleh pokdarwis. Kami para pedagang diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, misalnya soal fasilitas warung, pengelolaan sampah, dan aturan buka tutup lokasi jadi tidak cuma ikut-ikutan tapi benar-benar diajak terlibat dalam pengambilan keputusan. Menurut saya keterlibatan seperti ini membuat kami merasa punya tanggung jawab, bukan cuma numpang usaha saja mbak”.(Wawancara, 13 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengusaha warung makan di kawasan Hutan Pinus Pengger, peneliti menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengorganisasian pengelolaan wisata tidak hanya bersifat pasif sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui forum-forum yang diselenggarakan oleh Pokdarwis. Masyarakat dilibatkan dalam aspek-aspek penting seperti pengaturan fasilitas, pengelolaan lingkungan, serta keamanan kawasan wisata. Dalam pengorganisasian pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger, partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ide dan tenaga, tetapi juga melalui kontribusi harta benda. Masyarakat secara sukarela memberikan sumbangan berupa barang maupun dana untuk mendukung

kelancaran operasional dan pengembangan fasilitas wisata. Beberapa warga menyumbangkan bahan bangunan seperti semen, kayu, batu, dan atap seng untuk pembangunan toilet, pos jaga, hingga gardu pandang. Ada pula yang meminjamkan alat-alat kerja seperti cangkul, gerobak, dan mesin pemotong kayu. Selain itu, dalam berbagai kegiatan Pokdarwis, masyarakat turut memberikan bantuan dana untuk keperluan logistik, konsumsi rapat, hingga pelatihan pengelola.hal tersebut di atas selaras dengan yang di sampaikan oleh Sumar selaku ketua Pokdarwis.

“Ya mbak, sejak awal dibentuknya Pokdarwis, warga di sini sudah banyak membantu, bukan hanya dengan tenaga tapi juga harta benda. Ada yang menumbang semen,bambu dan lain-lain untuk kebutuhan pembangunan fasilitas” (wawancara 13 maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengusaha warung makan di kawasan Hutan Pinus Pengger, peneliti menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengorganisasian pengelolaan wisata tidak hanya bersifat pasif sebagai pelaku ekonomi,tetapi juga aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui forum-forum yang diselenggarakan oleh Pokdarwis. Masyarakat dilibatkan dalam aspek-aspek penting seperti pengaturan fasilitas, pengelolaan lingkungan, serta keamanan kawasan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan yang partisipatif telah menciptakan rasa memiliki, tanggung jawab, dan memperkuat keberlanjutan pengembangan wisata berbasis komunitas

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan yang partisipatif telah menciptakan rasa memiliki, tanggung jawab, dan memperkuat keberlanjutan pengembangan wisata berbasis komunitas. Selain itu, partisipasi masyarakat

juga terlihat melalui keterampilan yang mereka miliki. Beberapa warga yang memiliki kemampuan pertukangan terlibat langsung dalam pembangunan fisik, sementara yang lain dengan keterampilan di bidang desain, teknologi, dan pelayanan wisata turut membantu membuat papan informasi, mendesain area swafoto, serta melatih pemandu wisata lokal. Mereka juga berbagi ilmu dan melatih anggota Pokdarwis lainnya agar mampu menjalankan tugas secara profesional.

D. Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger

Masyarakat lokal memiliki peran sentral dalam pengendalian dan pengelolaan objek wisata Hutan Pinus, seperti yang peneliti lihat di kawasan Hutan Pinus Pengger, Dlingo, Bantul. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pelaku pasif, tetapi sebagai subjek aktif yang menjaga keseimbangan antara pengembangan wisata dan kelestarian alam.

Sejak awal pengembangan, warga sekitar dilibatkan dalam perencanaan dan perumusan aturan pengelolaan kawasan. Melalui forum musyawarah desa dan kelompok masyarakat, mereka turut menentukan batas-batas kawasan wisata, jenis aktivitas yang diperbolehkan, serta pedoman tata kelola lingkungan. Hal ini menjadi bentuk nyata dari pengendalian yang berbasis partisipatif.

Dalam praktiknya, masyarakat ikut mengendalikan aktivitas wisata agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Misalnya, mereka membatasi jumlah pengunjung di area tertentu, menjaga jam operasional, serta melarang

aktivitas merusak seperti vandalisme atau pembuangan sampah sembarangan. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) bersama warga juga melakukan patroli rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Warga masyarakat dilibatkan dalam pengendalian pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger seperti pengawasan terhadap operasional Wisata masyarakat ikut mengawasi kegiatan wisata agar sesuai aturan, tidak merusak lingkungan, dan tetap menguntungkan warga warga memberikan masukan atau kritik jika ada dampak negatif seperti sampah, atau ketimpangan ekonomi tidak hanya itu warga masyarakat juga berperan aktif dalam melaporkan kecurangan, penyalahgunaan dana atau pelanggaran aturan kawasan wisata. Warga selalu ikut dalam rapat evaluasi bersama pengelola untuk menilai kinerja dan merancang perbaikan pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger dan juga menjaga nilai dan kearifan lokal masyarakat Terong aktif dalam mendukung pengelolaan berkelanjutan tidak merusak alam dan ramah terhadap pengunjung.

Pengawasan harian pun dilakukan secara bergilir oleh warga yang menjadi petugas kebersihan, penjaga lokasi, maupun pengelola tiket. Mereka tidak hanya mengawasi perilaku pengunjung, tetapi juga menjaga kelestarian pohon pinus, sumber air, dan keanekaragaman hayati lain yang menjadi aset utama kawasan.

Melalui pelibatan aktif ini, masyarakat bukan hanya penerima manfaat ekonomi, tetapi juga penjaga keberlanjutan kawasan wisata. Kegiatan wisata yang berkembang pun tidak mengorbankan lingkungan, karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial atas kelangsungan objek

wisata tersebut. Dalam jangka panjang, partisipasi ini memperkuat rasa kepemilikan, mendorong kemandirian desa wisata, dan menciptakan model pengelolaan yang adil serta berkelanjutan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Sugiyono selaku Lurah di Kalurahan Terong:

“Masyarakat di sini terlibat aktif sejak awal, Mbak. Mulai dari pembentukan aturan kunjungan, pemilihan lokasi pembangunan fasilitas, sampai menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan. Kami juga yang mengawasi aktivitas wisata, terutama yang berpotensi merusak alam”.(Wawancara, 13 Maret 2025)

Dari Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sugiyono menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengendalian pengelolaan Hutan Pinus Pengger berlangsung secara aktif dan terstruktur. Warga tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga pengambil keputusan, pelaksana, dan pengawas dalam operasional kawasan wisata. Meskipun terdapat tantangan seperti perilaku pengunjung dan keterbatasan sumber daya, masyarakat mampu menjaga kelestarian kawasan wisata melalui kerja sama yang kuat dan rasa memiliki yang tinggi.

Pengalaman di Hutan Pinus Pengger menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pengelolaan objek wisata alam yang berkelanjutan dan adil.

Keberhasilan pengelolaan objek wisata secara berkelanjutan sangat bergantung pada sejauh mana pengendalian dilakukan secara konsisten, adil, dan partisipatif. Dalam konteks Hutan Pinus Pengger, keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, hingga pengawasan menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan kawasan wisata.

Melalui sistem pengendalian berbasis komunitas, masyarakat tidak hanya mengawasi aktivitas wisata agar sesuai dengan aturan yang telah disepakati, tetapi juga secara langsung menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan dampak ekonomi melalui peningkatan pendapatan warga, tetapi juga menumbuhkan kesadaran ekologis dan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberlangsungan alam.

Tantangan seperti tekanan jumlah pengunjung, perilaku wisatawan yang tidak peduli lingkungan, dan keterbatasan kapasitas SDM memang masih ada. Namun, dengan semangat gotong royong dan sistem pengendalian yang adaptif, masyarakat mampu menjaga objek wisata agar tetap lestari dan memberi manfaat jangka panjang. Dengan demikian, pengendalian dan pengelolaan objek wisata yang berbasis masyarakat bukan hanya soal menjaga aturan, tetapi juga tentang membangun sistem keberlanjutan yang menyatu dengan nilai-nilai lokal, kemandirian desa, dan kelestarian lingkungan. Berikut Wawancara dengan Sariyanto:

“Kami dilibatkan langsung dalam membuat aturan wisata, menjaga kawasan, dan mengelola operasional. Ada pembatasan jumlah pengunjung saat akhir pekan, larangan membuang sampah sembarangan, dan juga ada jadwal untuk kami Mbak”.(Wawancara, 13 Maret 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Sariyanto di atas menunjukkan bagaimana masyarakat ikut terlibat dalam pengendalian keberlangsungan operasional wisata.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memegang peran kunci dalam keberhasilan pengendalian dan pengelolaan objek wisata secara berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya terlibat sebagai tenaga kerja, tetapi juga berperan aktif dalam pembuatan aturan, pelaksanaan pengawasan, hingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan wisata. Melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan organisasi lokal lainnya, warga terlibat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan wisata. Bentuk pengendalian yang dilakukan antara lain: pembatasan jumlah pengunjung, pengawasan terhadap perilaku wisatawan, serta pelarangan aktivitas yang dapat merusak lingkungan seperti membakar sampah, atau merusak fasilitas. Partisipasi ini juga menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap kawasan wisata. Masyarakat merasa bertanggung jawab untuk menjaga kawasan karena mereka turut menikmati manfaat ekonominya, seperti peluang kerja dan peningkatan pendapatan lokal.

Meskipun tantangan seperti kurangnya kesadaran pengunjung dan keterbatasan sumber daya masih ada, sistem pengendalian berbasis masyarakat telah terbukti efektif menjaga kelestarian kawasan wisata dan memperkuat ekonomi lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat dan dukungan kebijakan yang berpihak pada pengelolaan partisipatif sangat penting untuk

menjaga keberlanjutan objek wisata kedepan.hal ini juga sama dengan yang disampaikan oleh Sumar selaku Ketua Pokdarwis:

“Kalau untuk pengendaliannya selain pengelola masyarakat juga ikut terlibat mbak. Pengendalian kami lakukan melalui beberapa cara. Pertama, kami batasi jumlah kunjungan saat musim ramai supaya hutan tidak rusak dan tetap nyaman dikunjungi. Kedua, ada aturan larangan seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak memetik tanaman. Semua aturan ini kami sosialisasikan ke pengunjung, dan petugas dari warga ikut mengawasi setiap harinya mbak”.(Wawancara, 13 Maret 2025)

Berdasarkan wawancara di atas masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap agenda dan kegiatan yang dilakukan di objek wisata Hutan Pinus Pengger berikut adalah wawancara dengan Ibu Eka:

“Iya, mbak saya memang tidak masuk Pokdarwis, tapi saya ikut dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, terutama area sekitar warung dan parkir. Kami juga sering diajak rapat oleh pengurus wisata untuk mendengarkan aturan baru dan diminta ikut membantu mengawasi pengunjung kalau ada yang melanggar aturan”.(Wawancara, 13 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga sekitar Hutan Pinus Pengger, terlihat bahwa masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam menjaga dan mengendalikan pengelolaan kawasan wisata. Walaupun tidak semua warga terlibat langsung dalam struktur formal seperti Pokdarwis, partisipasi mereka tampak nyata dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari menjaga kebersihan, mengingatkan pengunjung, hingga mengikuti kegiatan sosial yang berkaitan dengan pengelolaan wisata. Tanggapan masyarakat yang cenderung positif terhadap keberadaan objek wisata menunjukkan adanya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap kawasan tersebut. Hal ini menjadi modal sosial yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan

wisata berbasis masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi dan menegakkan aturan menunjukkan bahwa pengendalian wisata tidak hanya bersifat top-down dari pengelola, tetapi juga berjalan secara partisipatif dan kolektif.

Namun demikian, peneliti juga mencatat bahwa masih terdapat tantangan seperti perilaku pengunjung yang tidak disiplin dan keterbatasan kapasitas warga dalam aspek pelayanan atau pemahaman teknis pengelolaan wisata. Hal ini menjadi catatan penting bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat perlu didukung oleh pelatihan, sosialisasi, serta sinergi yang kuat antara pengelola wisata, masyarakat, dan pihak pemerintah.

Dengan demikian, wawancara ini memperkuat pemahaman bahwa pengelolaan wisata yang berkelanjutan tidak dapat terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas sosial dan penjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan aktivitas ekonomi. Pernyataan ini selaras dengan yang disampaikan oleh Ngadyo:

“Kalau ada pengunjung yang buang sampah sembarangan atau naik motor ke jalur pejalan kaki, kami langsung tegur. Kami juga bantu menutup akses kalau cuaca buruk atau ada pohon tumbang. Kita juga ikut bersih-bersih mingguan dan bantu perbaiki fasilitas kalau rusak ringan mba”.(Wawancara, 18 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga yang berperan langsung dalam operasional pengelolaan wisata, dapat disimpulkan bahwa pengendalian di Hutan Pinus Pengger tidak hanya bersifat struktural dari pengelola, namun berjalan secara partisipatif dan sosial melalui keterlibatan warga setempat. secara nyata menjalankan fungsi pengawasan, penegakan

aturan, dan pengendalian aktivitas wisata, walaupun tidak memiliki jabatan formal dalam organisasi pengelola.

Peneliti melihat bahwa pendekatan pengendalian berbasis masyarakat ini cukup efektif karena warga memiliki kedekatan langsung dengan kawasan, mengenal karakteristik pengunjung, serta memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi desa. Hal ini menciptakan sistem pengendalian informal yang bersifat responsif dan fleksibel, karena keputusan dan tindakan bisa langsung diambil di lapangan tanpa birokrasi yang panjang.

Namun demikian, tanggapan warga juga mengindikasikan bahwa sistem pengendalian ini masih bersifat *trial and error*, serta kurangnya pelatihan dan dukungan teknis dari pemerintah atau instansi terkait masih menjadi kendala. Oleh karena itu, peneliti memandang penting adanya sinergi antara pengelola, masyarakat, dan pemerintah dalam bentuk pelatihan, penyediaan sarana, serta evaluasi rutin untuk meningkatkan kapasitas warga sebagai pengelola dan pengendali lapangan. Secara keseluruhan, wawancara ini menguatkan temuan bahwa pengendalian wisata berbasis masyarakat mampu menciptakan sistem pengelolaan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip ekowisata dan pembangunan pariwisata yang inklusif.

E. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger

Harus bisa terhadap apa-apa saja program atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, tanpa adanya pengawasan oleh masyarakat bisa saja terjadi penyelewengan pada pelaksanaannya. Sehingga masyarakat juga selalu ada dan hadir untuk bersama-sama dengan kelompok sadar wisata Hutan Pinus pengger dalam menjaga kelestarian lingkungan seperti mengawasi kondisi hutan, mencegah penebangan liar, kebakaran dan kerusakan alam akibat aktivitas wisata, masyarakat juga mengontrol aktivitas wisata. Selain itu dengan adanya pengawasan bisa melihat atau mengetahui kendala ataupun masalah yang sedang dihadapi. Objek Wisata Hutan Pinus Pengger dikelola oleh Pokdarwis.

Di bawah ini merupakan wawancara peneliti dengan Sumar selaku Ketua Pokdarwis:

“Kalau pengawasan gini mbak dari setiap pengelola itu setiap bulan ikut pertemuan tetapi apabila ada kendala kemudian tidak bisa hadir paling tidak 2 atau 3 bulan sekali hadir di pertemuan. Kalau Kalurahan Terong Padukuhan Sendang sari kemudian ngobrol mengenai wisata hutan Pinus Pengger untuk pengawasan ini justru dari pihak pengelola sudah ngobrol langsung ke warga karna yang ikut mengelola adalah anak-anak dari kalurahan ini jadi pengelola itu sendiri sudah terbuka kepada masyarakat”.(Wawancara, 14 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap objek wisata Hutan Pinus Pengger bahwa pada dasarnya pada pengelola objek wisata hutan Pinus Pengger merupakan warga Kalurahan Terong itu sendiri, sehingga segala kegiatan yang dilakukan di Kalurahan Terong sudah secara sadar dan terbuka dibicarakan kepada

masyarakat oleh para pengelola pada pertemuan yang ada di Kalurahan Terong tempat para pengelola itu tinggal, hal ini juga menjadi bentuk pertanggung jawaban pengelola kepada masyarakat untuk senantiasa terbuka sehingga segala sesuatu yang akan direncanakan atau ada pembangunan yang akan dilakukan tidak bertolak belakang dengan masyarakat karena adanya keterbukaan tersebut. berikut wawancara peneliti dengan Sugiri Pengelola Objek Wisata Hutan Pinus Pengger:

“Ya, sangat dilibatkan Mbak. Kami percaya bahwa tanpa keterlibatan masyarakat, pengawasan tidak akan berjalan maksimal. Warga sekitar ikut terlibat dalam mengawasi pengunjung, menjaga fasilitas, serta melaporkan jika ada pelanggaran atau kejadian di lapangan. Kami anggap masyarakat sebagai mitra utama dalam menjaga keberlangsungan wisata ini mbak”.(Wawancara, 18 Maret 2025)

Hasil wawancara dengan pengelola Hutan Pinus Pengger mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan objek wisata tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berjalan secara partisipatif dan terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari masyarakat. Pengelola secara aktif melibatkan warga dalam fungsi pengawasan, seperti memantau perilaku wisatawan, menjaga kebersihan, dan melaporkan gangguan atau potensi kerusakan lingkungan.

Peneliti menilai bahwa pendekatan ini merupakan contoh nyata dari model pengelolaan wisata berbasis komunitas (*community-based tourism*), di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor yang turut mengendalikan kualitas lingkungan wisata. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan membentuk sistem sosial yang memperkuat kepatuhan terhadap aturan serta meningkatkan efisiensi respons terhadap

masalah di lapangan. Adapun tanggapan dari Ibu Yanti selaku pedagang di area wisata Hutan Pinus Pengger:

“Iya mbak biasanya kami mengawasi dari tempat kami berjualan. Kalau ada yang melanggar, kami beri tahu secara langsung, tapi dengan sopan. Kadang kami laporkan ke petugas Pokdarwis. Selain itu, warga juga ikut kerja bakti dan bersih-bersih area wisata seminggu sekali”.(Wawancara, 19 Maret 2025)

Wawancara dengan masyarakat yang berperan sebagai pedagang di kawasan wisata Hutan Pinus Pengger menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan wisata tidak terbatas pada petugas formal atau anggota Pokdarwis, melainkan juga mencakup warga yang beraktivitas ekonomi di dalam kawasan wisata, seperti pedagang.

Sebagai pihak yang berada langsung di lapangan, pedagang memiliki peran strategis dalam mengamati dan menanggapi perilaku wisatawan, baik secara aktif (seperti menegur wisatawan yang melanggar aturan) maupun pasif (melaporkan kejadian kepada petugas). Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan masyarakat tidak terstruktur secara birokratis, melainkan berjalan secara sosial dan berbasis kesadaran kolektif.

Dari sudut pandang peneliti, kondisi ini mencerminkan bahwa pengawasan berbasis masyarakat mampu menciptakan sistem kontrol informal yang responsif, fleksibel, dan murah. Keterlibatan pedagang dalam menjaga ketertiban dan kebersihan, meskipun bukan bagian dari tugas formal mereka, memperlihatkan bahwa kepedulian lingkungan tumbuh seiring dengan ketergantungan ekonomi mereka terhadap keberlanjutan wisata.

Namun, wawancara juga mencerminkan adanya kebutuhan akan dukungan penguatan kapasitas, seperti pelatihan komunikasi, pemahaman aturan, serta peran pedagang dalam menjaga citra destinasi. Partisipasi mereka perlu difasilitasi dan diakui secara resmi agar peran tersebut lebih optimal dan berkelanjutan.

Dengan demikian, peneliti menilai bahwa peran pedagang dalam pengawasan merupakan elemen penting dari tata kelola wisata yang inklusif dan berbasis masyarakat. Hal ini memperkuat gagasan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata alam tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kesadaran, peran aktif, dan kolaborasi masyarakat lokal. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Ibu Siti:

“Ada sih mbak Tapi tidak semua yang ada ikut dalam pertemuan rutin itu termasuk saya sendiri tidak ikut, tapi kalau mengawasi ya kami ikut memantau saja mba, terus kalau ada wisatawan yang melanggar pasti kami laporkan ke pengelolanya mbak”.(Wawancara, 19 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa meskipun sebagian masyarakat di sekitar Hutan Pinus Pengger telah menunjukkan partisipasi aktif dalam pengawasan dan pengelolaan objek wisata, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum berperan secara optimal, ketiadaan partisipasi dari sebagian masyarakat ini dapat menghambat upaya pelestarian lingkungan dan menciptakan kesenjangan sosial dalam pengelolaan wisata.

F. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

1. Faktor Pendorong bagi Masyarakat dalam Berpartisipasi Membangun Pariwisata Hutan Pinus Pengger

Keindahan Hutan Pinus dan pemandangan alam menjadi daya tarik wisatawan, mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan, masyarakat sadar akan potensi ekonomi dari pariwisata cenderung aktif berpartisipasi dengan adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga untuk mengadakan bantuan dana, pelatihan, atau regulasi yang mendukung pariwisata berbasis masyarakat.

Dengan adanya budaya gotong royong dan tradisi lokal yang memperkuat kerja sama dalam membangun dan mengelola wisata masyarakat selalu terlibat dalam pengelolaan objek wisata karena adanya rasa memiliki dan juga tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembangunan objek wisata tersebut oleh karena itu Kelompok Sadar Wisata memfasilitasi partisipasi masyarakat.

Hal serupa yang disampaikan oleh Sumar selaku Ketua Pokdarwis:

“Kalau untuk faktor pendorong dan penghambatnya banyak sih mbak Beberapa faktor yang sangat mendukung atau masyarakat dalam mengelola objek wisata wisata adalah potensi alam yang menarik, seperti pemandangan Hutan Pinus indah dan udara yang sejuk, yang secara alami menarik wisatawan. Selain itu adanya kesadaran masyarakat terhadap peluang ekonomi dari pariwisata juga sangat berperan. Kami juga terbantu oleh dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, promosi, dan bantuan fasilitas. Budaya gotong royong yang masih kuat di masyarakat menjadi kekuatan utama kami dalam menjaga dan mengembangkan destinasi wisata ini”.(Wawancara, 19 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menemukan faktor-faktor pendorong bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yang saling berkaitan berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan warga serta pengelola ditemukan bahwa motif ekonomi menjadi salah satu faktor dominan. Masyarakat melihat adanya peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan wisata, seperti membuka warung, menyediakan jasa parkir, menjadi pemandu wisata, hingga menjual kerajinan lokal. Selain itu, rasa memiliki terhadap kawasan wisata juga menjadi pendorong kuat. Hutan Pinus Pengger tidak hanya dipandang sebagai ruang ekonomi tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat, keterlibatan sejak awal perencanaan turut memperkuat keterikatan tersebut, sehingga warga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan mengembangkan kawasan secara berkelanjutan. berikut wawancara peneliti dengan pedagang di area wisata Hutan Pinus Pengger dengan Ibu Siti:

“Awalnya masih ragu-ragu mbak tapi setelah itu sadar karena saya melihat peluang. Dulu saya cuma Ibu Rumah Tangga, sekarang bisa bantu penghasilan keluarga, anak saya bisa sekolah dan buat sehari-sehari juga cukup mba. Selain dari itu juga kami sendiri berpikir jika ada peluang di sini untuk apa kita keluar daerah untuk cari kerjaan untuk menafkahi keluarga”.(Wawancara, 19 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di kawasan Wisata Hutan Pinus Pengger dapat peneliti simpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Objek Wisata sangat dipengaruhi oleh dorongan

ekonomi, rasa memiliki dan adanya dukungan dari pihak luar. Fakta bahwa masyarakat merasa memiliki kawasan wisata tersebut juga menunjukkan tingkat kesadaran dan tanggungjawab yang tinggi dalam menjaga keberlanjutan objek wisata. Adanya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah menjadi faktor pendukung yang memperkuat partisipasi mereka. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Yanti:

“Sebagai pedagang di kawasan objek wisata Hutan Pinus Pengger karna Tempat ini Milik Desa sendiri, jadi kami diberi kesempatan mba, saya lihat peluang ini bagus, karena sebelumnya saya kerja serabutan. Sekarang bisa punya usaha sendiri dan penghasilan lebih pasti mbak”.(Wawancara, 19 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang lokal di kawasan wisata Hutan Pinus Pengger dapat penulis simpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata didorong oleh kombinasi antara kebutuhan ekonomi, rasa memiliki terhadap lingkungan dan dukungan struktural dari pengelola serta pemerintah. Partisipasi aktif ini juga diperkuat oleh adanya pelatihan musyawarah warga dan pola gotong royong yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Kalurahan Terong. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan objek wisatanya, tetapi juga pada kekuatan sosial dan budaya masyarakat yang mendukungnya. Namun di balik dorongan tersebut terdapat juga hambatan yang dapat melemahkan partisipasi masyarakat berikut adalah faktor penghambat bagi masyarakat dalam berpartisipasi.

2. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Pinus Pengger

Masyarakat mungkin belum memiliki keahlian dalam mengelola destinasi wisata, seperti pemasaran, pelayanan wisatawan, atau manajemen keuangan. Minimnya modal atau dana awal membuat pembangunan fasilitas wisata terbatas atau promosi menjadi lambat hal lainnya juga kurangnya koordinasi atau kepemimpinan sehingga rentan terjadi konflik internal dan tidak adanya tokoh penggerak yang membuat partisipasi masyarakat lemah. faktor penghambat lainnya kurangnya akses informasi secara merata, ketimpangan peran dalam kelompok pengelola, serta tantangan dalam pengelolaan keuangan dan distribusi hasil usaha. Selain itu masih terdapat warga yang merasa belum dilibatkan secara penuh, terutama dalam proses pengambilan keputusan atau distribusi manfaat ekonomi adapun hal lainnya juga adanya ketergantungan pada bantuan eksternal yang menyebabkan masyarakat bergantung pada bantuan luar sehingga semangat kemandirian menjadi lemah/ menurun dari sisi lain kerusakan lingkungan atau over kapasitas juga jika tidak dikelola dengan baik, tekanan wisatawan bisa merusak lingkungan dan menimbulkan konflik kepentingan.

Hal tersebut yang serupa dengan yang disampaikan oleh Juwinto saat diwawancarai:

“Beberapa kendala yang kami hadapi dalam pengelolaan wisata antara lain adalah kurangnya pelatihan atau pengetahuan Teknis tentang manajemen pariwisata. Masyarakat belum semuanya paham cara mengatur keuangan, promosi digital, atau pelayanan yang baik bagi wisatawan. Selain itu, terkadang fasilitas yang ada masih terbatas karena kekurangan dana. Faktor lain adalah kurangnya

pembagian tugas yang jelas, sehingga koordinasi antar pengelola kurang maksimal. Tak jarang juga terjadi perbedaan pendapat antar warga yang bisa menghambat jalannya pengelolaan”(Wawancara, 14 Maret 2025)

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa meskipun masyarakat menunjukkan antusiasme dalam pengelolaan Objek wisata Hutan Pinus Pengger, terdapat faktor penghambat yang mengurangi efektivitas dan keberlanjutan partisipasi mereka. Beberapa warga menyatakan adanya ketimpangan informasi dan komunikasi terutama antara pengelola dan warga yang tidak tergabung dalam struktur formal. Penghambat lain yang teridentifikasi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia terutama dalam hal manajemen usaha, promosi digital, dan pelayanan wisata. Sebagian warga juga menghadapi kendala dalam hal modal usaha dan akses fasilitas yang membuat tidak semua masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi secara merata. Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Suyati selaku Dukuh Sendang Sari:

“Dalam pengelolaan objek Wisata kita menghadapi beberapa faktor pendorong dan penghambat namun itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk berhenti di tempat dan terus berjuang mengelola dan mengembangkan potensi alam yang ada mba”.(Wawancara, 14 Maret 2025)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suyati menerangkan bahwa ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger namun tidak menjadi penghambat untuk terus berbenah dan berjuang bersama-sama mewujudkan wisata lokal yang menunjang keberlanjutan ekonomi bagi warga masyarakat. Adapun faktor

penghambat dalam pengelolaan adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis, keterbatasan dana, koordinasi yang belum optimal, serta konflik kepentingan di antara warga. Berikut wawancara dengan Sariyanto:

“Iya mba kadang bingung juga mau ikut dari mana. Informasinya nggak selalu sampai ke warga yang bukan bagian dari kelompok. Jadi ya seolah-olah cuma orang tertentu saja yang boleh ikut”. (Wawancara, 14 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan salah satu warga yang belum terlibat aktif dalam pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menghadapi beberapa kendala nyata. Faktor utama yang menghambat keterlibatan adalah kurangnya informasi dan komunikasi yang merata antara pengelola inti dengan masyarakat umum.

Jadi berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa perlu adanya inovasi-inovasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata hutan pinus pengger seperti inovasi penajaman prinsip dan pembelajaran dari kasus lain, merancang mekanisme dan instrumen, dan mengawal proses, agar masyarakat mendapatkan manfaat yang secara maksimal dari keberadaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger, dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger perlu diperkuat melalui peningkatan komunikasi dua arah, pemerataan informasi, transparansi pengelolaan, serta pemberdayaan kapasitas warga melalui pelatihan dan dukungan finansial. upaya ini penting agar partisipasi tidak hanya bersifat simbolik,

tetapi benar-benar melibatkan masyarakat sebagai Subjek utama dalam pembangunan pariwisata berbasis Lokal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger sudah berjalan semestinya. masyarakat Kalurahan Terong berperan aktif dalam pengelolaan Objek Wisata terutama pada tahap:

- 1 Perencanaan melalui kontribusi Tenaga dan pemikiran yang menjadi bentuk partisipasi paling dominan, warga terlibat langsung dalam pembangunan fisik, memberi Ide dan masukan dalam musyawarah, serta mendukung melalui penyediaan sarana meskipun dalam jumlah yang lebih terbatas, Namun mengupayakan untuk terlibat dan berkontribusi bersama-sama dengan pengelola dan pemerintah. meskipun partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger cukup aktif, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal pemerataan partisipasi, penguatan Kapasitas, dan transparansi proses perencanaan agar lebih inklusif dan berdaya guna untuk semua pihak
- 2 Dalam pengorganisasian, masyarakat tergabung dalam kelompok sadar Wisata (Pokdarwis) dan koperasi untuk menjalankan pengelolaan secara struktural dan berkelanjutan. Pembagian tugas dilakukan secara partisipatif berdasarkan kesepakatan bersama. Pengorganisasian ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek Utama dalam pengelolaan, yang mampu mengatur sumber daya manusia dan

kegiatan wisata secara mandiri.namun, masih dibutuhkan penguatan kapasitas organisasi melalui pelatihan manajemen dan peningkatan keterampilan administratif agar pengelolaan dapat berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.

- 3 Dalam aspek pengendalian, masyarakat menetapkan aturan lokal untuk menjaga kelestarian Alam dan kenyamanan pengunjung.pengendalian dilakukan melalui kesepakatan sosial yang didukung oleh norma dan sanksi adat,partisipasi masyarakat Kalurahan Terong menunjukkan peran yang cukup aktif,meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan.Masyarakat turut serta dalam menetapkan aturan-aturan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan wisata. Pengendalian dilakukan secara kolektif dengan berbasis pada nilai-nilai sosial dan budaya lokal namun demikian sistem pengendalian masih bersifat sederhana dan belum terdokumentasi secara tertulis atau sistematis.ketiadaan pedoman atau standar baku dapat menjadi kendala dalam pengembangan pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan .
- 4 Pada pengawasan, masyarakat melakukan pemantauan secara mandiri dan untuk menjaga keamanan,kebersihan,dan ketertiban lingkungan wisata. Partisipasi masyarakat Lokal cukup signifikan dalam berbagai aspek pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger baik dalam bentuk perencanaan,pengorganisasian,pengendalian hingga pada pengawasan masyarakat turut berperan sebagai pengelola,pelaku usaha,serta menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah Daerah dan Pihak Pengelola disarankan untuk meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat, terutama dalam bidang manajemen wisata, pemasaran Digital dan pelayanan pengunjung, agar partisipasi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga strategis.

Perlu adanya mekanisme evaluasi dan transparansi dalam pengelolaan Objek Wisata, khususnya terkait pembagian hasil dan pengambilan keputusan agar masyarakat tetap merasa dilibatkan secara adil dan berkelanjutan. Kemudian ada beberapa faktor yang menjadi tantangan bagi masyarakat dalam berpartisipasi

- 5 Faktor pendorong bagi masyarakat berpartisipasi antara lain adalah kesadaran akan potensi ekonomi lokal, rasa memiliki terhadap objek wisata, serta dukungan dari pemerintah Desa dan Pengelola Wisata. Namun demikian partisipasi masyarakat Kalurahan Terong juga dihadapkan pada.
- 6 Faktor penghambat karena beberapa warga masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait pengelolaan objek wisata yang berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya, seperti modal usaha, sarana prasarana, dan akses informasi. Di samping itu, munculnya perbedaan kepentingan atau dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan sehingga mengurangi semangat gotong royong.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Kendala yang dihadapi dalam partisipasi masyarakat tersebut mencakup kurangnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, keterbatasan

dalam hal manajemen dan promosi digital serta minimnya partisipasi generasi muda.

Model pengelolaan yang kolaboratif antara masyarakat, lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH), Pemerintah Desa dan Dinas Pariwisata menjadi Kunci keberhasilan pengelolaan objek Wisata Hutan Pinus Pengger.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang diajukan Peneliti: Saran-saran berikut diajukan guna memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger secara lebih optimal dan berkelanjutan.

1. Peningkatan kualitas partisipasi dalam perencanaan.
2. Pemerintah Kalurahan dan pengelola Wisata diharapkan membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif, tidak hanya melibatkan Tokoh tertentu, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Pelibatan warga secara menyeluruh dalam musyawarah dan perumusan program wisata akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kawasan Wisata.

Penguatan kelembagaan pengorganisasian kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai lembaga pengelola diperkuat dari segi struktur organisasi, manajemen internal, dan kapasitas anggotanya. Diperlukan pelatihan rutin dalam bidang pengelolaan wisata, pelayanan pengunjung serta kewirausahaan agar organisasi dapat berjalan secara lebih profesional dan efisien.

3. Penyusunan Sistem pengendalian yang lebih terstruktur.meskipun pengendalian selama ini dilakukan berbasis kesepakatan sosial,diperlukan penyusunan aturan tertulis dan standar Operasional yang jelas. Hal ini bertujuan agar proses pengelolaan dapat berjalan lebih konsisten,objektif, dan dapat dievaluasi secara berkala.
4. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pengawasan masyarakat perlu terus diberdayakan untuk menjadi pengawas yang aktif terhadap kegiatan wisata,baik dalam hal kebersihan,keamanan,maupun pelayanan.
5. Pengawasan yang dilakukan secara sukarela perlu dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas serta insentif yang sesuai agar tetap berkelanjutan.
6. Mengoptimalkan faktor pendorong partisipasi masyarakat seperti dukungan dari Pemerintah dan lembaga terkait harus terus ditingkatkan melalui bantuan teknis,pelatihan, dan penyediaan fasilitas.potensi alam dan budaya dimiliki masyarakat harus diintegrasikan dalam perencanaan pengelolaan agar partisipasi warga lebih terarah dan berkelanjutan.
7. Untuk Mengatasi faktor penghambat dan solusi konkret untuk mengatasi hambatan partisipasi,seperti keterbatasan pemahaman,konflik kepentingan,atau kurangnya modal, perlu dilakukan pendekatan yang bersifat edukatif dan kolaboratif.Pemerintah Desa,lembaga pendidikan,serta pelaku usaha wisata dapat bekerja sama dalam menyediakan akses

informasi,modal bergulir,serta fasilitasi mediasi jika terjadi perbedaan pandangan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, M. (2010). *Langkah-langkah Pelaksanaan Pengelolaan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009*.
- Agiatama, Ian & Muhammad Farid. 2018. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Wisata (Studi Kasus Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto)." *Google Scholar* Volume 6(9)
- Adi, Isbandi Rukminto. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Buchari Alma, & Juniprian, D. (2014). *Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa*. Alfabeta.
- Bobsuni, B. (2021). *Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan*.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*. Ithaca, NY: Rural Development Committee, Center for International Studies, Cornell University.
- Dewi, I. (2013). *Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat*. UGM Press.
- Davis, K. (1989) *human relations at work: the dynamics of organizational behavior*. McGraw-hill.
- Davis, Keith, & Newstrom, John W. (1989). *Perilaku dalam Organisasi (Edisi ke-7, diterjemahkan oleh Agus Dharma)*. Jakarta: Erlangga.
- Dinas Pariwisata Jawa Tengah. (2002). *Profil pariwisata Jawa Tengah*. Dinas Pariwisata Jawa Tengah.
- Dwyer, L., Forsyth, P., & Dwyer, W. (2010). *Tourism Economics and Policy*. Channel View Publications.
- Fattah, N. (2004). *Landasan manajemen pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Hamidah, Nanik. 2016. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi Kasus Objek Wisata Bukit Jamur Di Kecamatan Bungah Gresik)." *Google Scholar* Volume 6(9)
- Hermawan, H. (2016). *Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal*. *Jurnal Pariwisata*, 3(1).
- Isbandi M. (2007) *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*.
- Irfan, Muhammad, Abdul Aziz, S.R., M.Si, & Juwita Hayuning Prasttiwi, S.IP., M.IP. (2022). *Penerapan E-Voting dan Partisipasi Masyarakat Dalam*

- Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Agam Tahun 2021*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Pariwisata.
- Linton, R. (2020). *Use of Tobacco Among North American Indians: Anthropology Leaflet 15*. Alpha Edition. ISBN: 9789354304378
- Mustanir. (2017) *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan: Perspektif Koentjaraningrat*. Penerbit.
- Muljadi, A.J. (2010). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manulang. (2002). *Pengorganisasian*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. Dalam Latifa. (2021). *Teknik Analisis Data*.
- Murdikanto. (dalam Mustanir, 2017) *Pembangunan sosial budaya dalam perspektif pembangunan nasional*. Graha Ilmu.
- Melayu's, M. H. 2007. *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Manulang, S.H. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. 2003. *Pengelolaan Objek Wisata*. (2009). *Pengelolaan Objek Wisata: Manajemen*.
- Nasikun. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prasetyo, A. 2020 *Masyarakat dan Kebudayaan: Perspektif Ralph Linton*. Penerbit.
- Purwanti, N. D., & Dewi, R. M. 2014. Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2006–2013. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2(3)
- Rajab, M. H., Soheib, M., & Rajab, M. H. 2021. Challenges to online medical education during the COVID-19 pandemic. *Cureus*, 13(2), e13536

- Ritwan. 2021. Dalam Irfan, B. (Ed.), *Objek Wisata*.
- Rianto. Dalam Adrika. 2022. *Dokumentasi*.
- Rhamdayani, S., & Suharno, S. 2021. Partisipasi masyarakat di Hutan Pinus Pengger. *Agora: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 10(3),
- Riyanto, R., Laksono, R. A., & Rahayu, Y. S. (2022). Pengujian Efektivitas Jenis dan Konsentrasi ZPT terhadap Keberhasilan Stek Batang Tanaman Anggur (*Vitis vinifera* L.) Varietas Jestro AG5. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1),
- Satori, D., & Komariah, A. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sussnto, M. S. 2014. *Perencanaan sebagai Perhitungan atau Penentuan*.
- Satori, D., & Komaria. Dalam Adrika. 2020. *Wawancara*.
- Soemardjan, S. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Soetopo, Aliefien. 2011. "Mengenal Lebih Dekat: Wisata Alam Indonesia-Aliefien Soetopo-Google Books." https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=PDlnCwAAQB AJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=wisata+alam+di+indonesia+yang+menakjubkan&ots=yIDtBb9p2Q&sig=wEUIklQ_ACgXYpJ3oc2cXuCX08o&redir_esc=y#v=onepage&q=wisata+alam+di+indonesia+yang+menakjubkan&f=false (diakses pada November 14, 2020).
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soetopo, Aliefien. 2011. "Mengenal Lebih Dekat: Wisata Alam Indonesia-Aliefien.
- Sastropetro, R. A. S. 1986. *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Bandung: Alumni.
- Sedarmayanti, Prof. Dr. Hj. 2018. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Thesia, Aprillia, Andini, Krisnha S., Nugraha, Prima G.P., & Mardikanto, Totok. 2014. *Pembangunan berbasis masyarakat: Acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2009). *Prinsip-prinsip manajemen (edisi revisi)*. Bumi Aksara.

Theodorson, G. A., & Theodorson, A. G. (1986). *A Modern Dictionary of Sociology*. New York: Thomas Y. Crowell Company.

Timothy, D. J. (2013). *Participatory Planning: A View of Tourism in Indonesia*. *Annals Review of Tourism Research*, 26(2)

Widodo. Dalam Dimu. (2021). *Observasi*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata.
Google

PANDUAN WAWANCARA

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Objek Wisata Hutan Pinus Pengger di Kalurahan Terong Padukuhan Sendang Sari Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksana wawancara

Hari/ tanggal, Waktu :

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Objek wisata Hutan Pinus Pengger melalui partisipais pikiran,tenaga,harta benda,ketrampilan dan partisipasi sosial ?
2. bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengorganisasian pengelolaan Hutan Pinus Pengger objek wisata?
3. bagaimana partisipasi masyarakat pengendalian pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger ?
4. bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger ?
5. Bagaimana proses awal pengelolaan objek wisata ini? Apakah ada tantangan tertentu yang dihadapi dalam tahap awal?
6. Bagaimana pihak pengelola memastikan keberlanjutan dan kelestarian hutan ini?
7. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger?
8. Bagaimana struktur organisasi pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger?
9. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengorganisasi kegiatan atau operasional objek wisata Hutan Pinus Pengger?
10. Bagaimana proses pengendalian dilakukan jika ada masalah atau ketidak sesuaian dalam pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger?

11. Apakah masyarakat terlibat dalam upaya pengendalian terhadap keberlanjutan lingkungan kelestarian Hutan Pinus Pengger?
12. Bagaimana sistem pengawasan terhadap kegiatan wisata Hutan Pinus Pengger?
13. Bagaimana kolaborasi antara masyarakat dengan pengelola atau pemerintah dalam mengatur kegiatan di Hutan Pinus Pengger?
14. Apakah ada faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan objek wisata Hutan Pinus Pengger?
15. Apakah yang perlu dilakukan agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek Wisata Hutan Pinus Pengger lebih efisien?

LAMPIRAN



Foto Wawancara Dengan Bapak Lurah Terong



Foto Wawancara Dengan Bapak Sumar Selaku Ketua Pengelola Objek Wisata Hutan Pinus Pengger



Foto Wawancara Dengan Ibu Siti Selaku Pedagang



Foto Wawancara Dengan Ibu Eka Selaku Masyarakat Biasa



Foto Wawancara Dengan Bapak Suyati Selaku Duku Sendang Sari



Foto Wawancara Dengan Bapak Sariyanto Selaku Masyarakat Biasa